



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI RIAU PERIODE 2011-2013

SKRIPSI



**MOLYNA NANDISHA
1110532077**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **MOLYNA NANDISHA**
No. BP : **1110532077**
Program Studi : **Strata Satu (S-1)**
Jurusan : **Akuntansi**
Konsentrasi : **Perpajakan**
Judul : **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi
Riau Periode 2011-2013**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 4 Mei 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

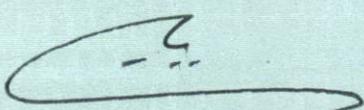
Padang, 6 Juli 2015

Pembimbing

Kepala Program Studi Akuntansi


Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak, CA

NIP. 197906182002122004


Dr. H. Subairi, SE, M.Si, Ak.

NIP. 196012211987021002



No Alumni Universitas

MOLYNA NANDISHA

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Medan / 18 November 1993 b). Nama Orang Tua : Yudisman c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1110532077 f). Tanggal Lulus : 6 Juli 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,59 i). Lama Studi : 4 tahun j). Alamat Orang Tua: Jl. PWS No. 94, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara.

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013

Skripsi Oleh Molynda Nandisha

Pembimbing Dr. H. Suhairi, SE, M.Si, Ak

ABSTRACT

The aimed of this research is to determine how the comparison of financial performance between the districts/cities in the province of North Sumatra and Riau province by using the ratio of local financial independence, acceptance of locally-generated revenue effectiveness ratio, and the ratio of locally-generated revenue growth. Types of research by the author is a comparative descriptive research, data collection is done by the method of documentation and literature. Analysis was performed by comparing the level of local independence, acceptance of locally-generated revenue effectiveness and locally generated revenue growth between the districts/cities in the province of North Sumatra and Riau in period 2011-2013. Results from this research indicate that the level of independence of local financial independence and acceptance of locally-generated revenue effectiveness districts/cities in Riau province is higher than the province of North Sumatra, but the rate of growth of government revenue districts/cities in North Sumatra province is higher than the province of Riau.

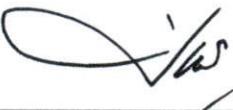
Keywords: *local financial independence, acceptance of locally-generated revenue effectiveness, locally-generated revenue growth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, dan rasio pertumbuhan PAD. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif komparatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat kemandirian daerah, efektivitas penerimaan PAD dan pertumbuhan PAD antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dan efektivitas penerimaan PAD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, namun tingkat pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau.

Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah, efektivitas penerimaan PAD, pertumbuhan PAD

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Mei 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Nini Syofriyeni , SE, M.Si, Ak	Dr. H. Suhairi, SE, M.Si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak
NIP. 197205021996021001

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013

merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh..

Padang, 6 Juli 2015

Yang Memberi Pernyataan

Molyna Nandisha

No. BP : 1110532077

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat aku sayangi Bapak Yudisman dan Mama Erlina.
Tidak ada kata yang dapat menggambarkan keikhlasan beliau dalam menjaga sepenuh hati, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang yang tiada batas, dan selalu memaafkan setiap kesalahan putri kecilnya. Hanya kado kecil ini yang dapat putri kecilmu berikan saat ini dan tidak akan pernah dapat menutupi semua kebaikan yang pernah diberikan kepadaku selama ini. Semoga Allah dapat membalas semua kebaikan beliau dan kelak surgalah tempat beliau berada, Amin Ya Robbal Alamin.
2. Abang dan kakakku terkasih Koncho Putra Adila, S.Iikom dan Dian Rizki, SE

yang telah membimbing dan membantuku selama ini baik secara moril maupun materi.

3. Seorang lelaki yang terbaik ♥ Wika Hari Sastra, S.TP yang senantiasa menjadi tempat berkeluh-kesah, yang selalu mensupport, dan selalu memotivasi untuk mencapai cita-citaku.
4. Keluarga besar mamaku dan bapakku, sepupuku yang lucu-lucu Lady, Windy, Sanly dan Welsen ♥ yang selalu memberi ketenangan via telepon saat seorang anak rantauan rindu akan keluarga besarnya.
5. Bapak Dr. H. Suhairi, M. Si ,Ak selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak membantu untuk memberikan masukan dan nasehat tiada dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan serta membantu penulis untuk belajar dalam menghadapi ujian komprehensif bersama teman-teman sebingingan lainnya.
6. Ibu Nini Syofriyeni , SE, M.Si, Ak selaku penelaah skripsi sekaligus penguji ujian komprehensif saya yang banyak memberikan masukan atas setiap kekurangan saya.
7. Bapak Drs., Suhandi, M.Si, Akt selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan banyak kemudahan dalam masalah akademik.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan dari awal hingga akhir.

9. Kepada para pegawai Biro Jurusan Akuntansi yang telah turut membantu mengurus segala berkas-berkas penulis.
10. Teman perantauan seperjuangan Hardila, tempat curhat dikala sama-sama merasa sangat merindukan kehangatan dan kenyamanan rumah sendiri dan makan masakan mama.
11. Teman kos yang mempunyai sifat dan karakter berbeda Sofvani Ramadhani dan Keichy Anomosa namun tetap bisa saling berbagi dan memahami satu sama lain.
12. Teman-teman SSC Sara, Sarah, Tiara, Okky, Febby, Ditta yang kusayangi ♥ yang selalu saling menyemangati.
13. Teman perantauan Triana W.W.N alias Yayan yang baik hati dan memberikan rasa haru saat pengumuman kelulusan kompre♥.
14. Teman seimbang Nisa, Ozzy, Ramon yang lucu dan kece.
15. Teman-teman ekonomi Akt'11 yang sepenanggungan untuk meraih gelar sarjana.

Akhir kata penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Padang, 6 Juli 2015

Penulis,

Molyna Nandisha

1110532077

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Tinjauan Literatur	7
2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	7
2.1.2 Keuangan Daerah	8
2.1.3 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ..	10
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.1.5 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	13
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Berpikir.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.3 Variabel Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Metode Pengumpulan Data	28
3.6 Metode Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	33
4.1.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013	41
4.1.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013	44
4.1.3 Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013	47
4.2 Gambaran Umum Provinsi Riau	49
4.2.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013	55
4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013	57
4.2.3 Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013	59

4.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013	61
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan Penelitian	67
5.3 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	26
Tabel 3.2 Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau	26
Tabel 3.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	29
Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	31
Tabel 4.1 Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	35
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	38
Tabel 4.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	40
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	42
Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	45
Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	47
Tabel 4.7 Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	51
Tabel 4.8 Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	52

Tabel 4.9 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	54
Tabel 4.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	56
Tabel 4.11 Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	58
Tabel 4.12 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	60
Tabel 4.13 Perbandingan Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau	61
Tabel 4.14 Perbandingan Rata-rata Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau	63
Tabel 4.15 Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011
- Lampiran 2 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012
- Lampiran 3 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013
- Lampiran 4 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2011 - Permen
- Lampiran 5 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2011 - SAP
- Lampiran 6 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2012 - Permen
- Lampiran 7 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2012 - SAP
- Lampiran 8 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2013 - Permen
- Lampiran 9 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2013 - SAP
- Lampiran 10 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2011
- Lampiran 11 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2012

Lampiran 12 : Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2013

Lampiran 13 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2011 - Permen

Lampiran 14 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2011 - SAP

Lampiran 15 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2012 - Permen

Lampiran 16 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2012 - SAP

Lampiran 17 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2013 - Permen

Lampiran 18 : Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2011 - SAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien (Ramandei, 2009). Adinata (2012) menyebutkan terdapat konsep desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan

dan pengawasan keuangan.

Adinata (2012) juga menyebutkan pelimpahan wewenang menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri, yang berarti dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Salah satu hak otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Wahyuni (2010) menyebutkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis,

efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan kinerja keuangan antara pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Alasan penulis meneliti kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, karena berdasarkan data pendapatan daerah pada **Tabel 1.1** Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau termasuk provinsi memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi diantara seluruh provinsi yang berada di Pulau Sumatra periode 2011-2013.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera
(dalam jutaan rupiah)

Provinsi	Tahun			Rata-rata
	2011	2012	2013	
Aceh	7.610.320	9.180.143	10.671.827	9.154.097
Sumut	4.958.482	7.200.498	7.405.958	6.521.646
Riau	5.440.440	6.847.316	6.994.646	6.427.468
Sumsel	3.963.985	5.223.940	5.468.140	4.885.355
Lampung	2.527.991	3.721.020	3.901.951	3.383.654
Sumbar	2.183.959	2.922.582	3.147.840	2.751.460
Jambi	2.078.807	2.662.697	2.878.935	2.540.146
Bengkulu	1.166.982	1.562.525	1.696.370	1.475.293

Sumber:DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 1.1**, rata-rata penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau hampir sebanding sehingga penulis mengambil judul “ Analisis Perbandingan

Kinerja Keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013” untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah kedua provinsi yang memiliki pendapatan yang hampir sebanding.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan PAD?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan PAD.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013 dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau..
2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

- a. Bab I, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

- b. Bab II, berisi tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Review Penelitian Terdahulu serta Kerangka Berpikir.
- c. Bab III, berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- d. Bab IV, berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.
- e. Bab V, bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Tinjauan Literatur

2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Latin *autos* yang bermakna sendiri dan *nomos* yang bermakna aturan. Jadi secara singkat otonomi bisa diartikan sebagai aturan yang diterapkan sendiri atau tidak mengikuti aturan lainnya. Dalam dunia pemerintahan, otonomi bisa dimaknai dengan mengatur atau memerintah sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahmad Yani (2008) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah dan potensi yang dapat dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah yang bersangkutan, karena pendapatan asli daerah (PAD) ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya

desentralisasi fiskal. Desentralisasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan seperti keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya. Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2002) :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran .
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

2.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Basuki, 2008). Dalam pengertian keuangan daerah

yang dikutip oleh Basuki (2008), keuangan daerah melingkupi :

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

1. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
2. *Value for money*, prinsip ini dioperationalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
5. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

2.1.3 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya (Devas, 1989). Di dalam kerangka otonomi, kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak terlepas dari pandangan bahwa daerah harus sanggup/mampu untuk membiayai daerahnya sendiri. Kemampuan untuk membiayai/mendanai daerah sendiri merupakan tantangan yang harus dihadapi suatu daerah dalam

penyelenggaraan otonomi. Dalam hal ini mendanai daerah sendiri untuk anggaran pembelanjaan daerah, menunjukkan bahwa daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.

Hubungan keuangan pusat dan daerah juga berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju *clean government* dan *good governance* (Yani, 2008). Perimbangan keuangan antar pemerintahan merupakan suatu mekanisme bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah kabupaten/ kota. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini biasanya disebabkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan vertikal maupun horizontal (Yani, 2008). Ketimpangan vertikal muncul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan pemerintah daerah, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak. Sementara itu, ketimpangan horizontal adalah ketimpangan antar sesama daerah yang muncul akibat adanya perbedaan luas wilayah, luas distribusi kewenangan atas objek pajak maupun objek bukan pajak. Ketimpangan horizontal ini juga bisa diakibatkan oleh adanya perbedaan biaya dan tekanan permintaan atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab mereka.

Hubungan keuangan pusat dan daerah diperlukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal yang merupakan dampak dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal. Salah satu wujud dari hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat dari adanya transfer dana dari pusat ke daerah atau yang sering disebut dengan dana perimbangan.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi, yang mana anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, yang mana anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, yang mana anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yang mana anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, yang mana anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, yang mana anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.5 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Kelompok pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensinya sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - 1) Pajak daerah

- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup:
 - a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
 - c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - c) Jasa giro;
 - d) Pendapatan bunga;
 - e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
 - j) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - k) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - l) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
 - b. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi:
 - 1) Dana alokasi umum (DAU);
 - 2) Dana alokasi khusus (DAK); dan
 - 3) Dana bagi hasil (DBH), yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah lain-lain pendapatan daerah yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Pendapatan lain-lain yang sah meliputi :
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Pendapatan Dana Darurat;
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - 5) Dana Penyesuaian; dan
 - 6) Dana Otonomi Khusus.
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah sebagai berikut :

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum;
- 4) Perumahan rakyat;
- 5) Penataan ruang;
- 6) Perencanaan pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan hidup;
- 9) Kependudukan dan catatan sipil;
- 10) Pemberdayaan perempuan;
- 11) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 12) Sosial;
- 13) Tenaga kerja;
- 14) Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM);
- 15) Penanaman modal;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Pemuda dan olahraga;
- 18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 19) Pemerintahan umum;
- 20) Kepegawaian;
- 21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22) Statistik;
- 23) Arsip; dan
- 24) Komunikasi dan informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja

- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Bunga
 - c) Subsidi;
 - d) Hibah;
 - e) Bantuan sosial;

- f) Belanja bagi hasil;
 - g) Bantuan keuangan; dan
 - h) Belanja tak terduga.
- 2) Belanja Langsung, meliputi :
- a) Belanja pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja modal
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan, yang meliputi :
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
 - 2) Pencairan dana cadangan;
 - 3) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - 6) Penerimaan piutang daerah.
 - b. Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi :
 - 1) Pembentukan dan cadangan;

- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sedarmayanti (2003) kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim (2007) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio efektivitas penerimaan PAD

Rasio efektivitas penerimaan PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas penerimaan PAD menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

4. Rasio keserasian belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tabel berikut ini menunjukkan ringkasan dari penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dalam menilai kinerja keuangan daerah. Untuk lebih memperjelas penelitian terdahulu, berikut ditampilkan matrik penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Umminah (2013)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Provinsi Aceh dan Provinsi Riau Tahun 2010-2012 dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Kinerja keuangan pemerintah	Kemampuan daerah kabupaten/kota di Aceh dan Riau dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Masing-masing daerah masih sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal keuangan.
2.	Agustina (2013)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)	Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah	Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik.

3.	Puspitasari (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011.	Kinerja keuangan pemerintah daerah	Rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik.
4.	Batafor (2011)	Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT.	Kinerja keuangan, Kesejahteraan masyarakat	(1) Ditinjau dari aspek kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja pemerintah Kabupaten Lembata, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di periode I tidak berbeda signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan di periode II. (2) Dilihat dari aspek pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lembata, disimpulkan bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat di periode I berbeda signifikan terhadap rata-rata kesejahteraan masyarakat di periode II.
5.	Jusmawati (2011)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi PAD	Kinerja keuangan daerah	Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik.

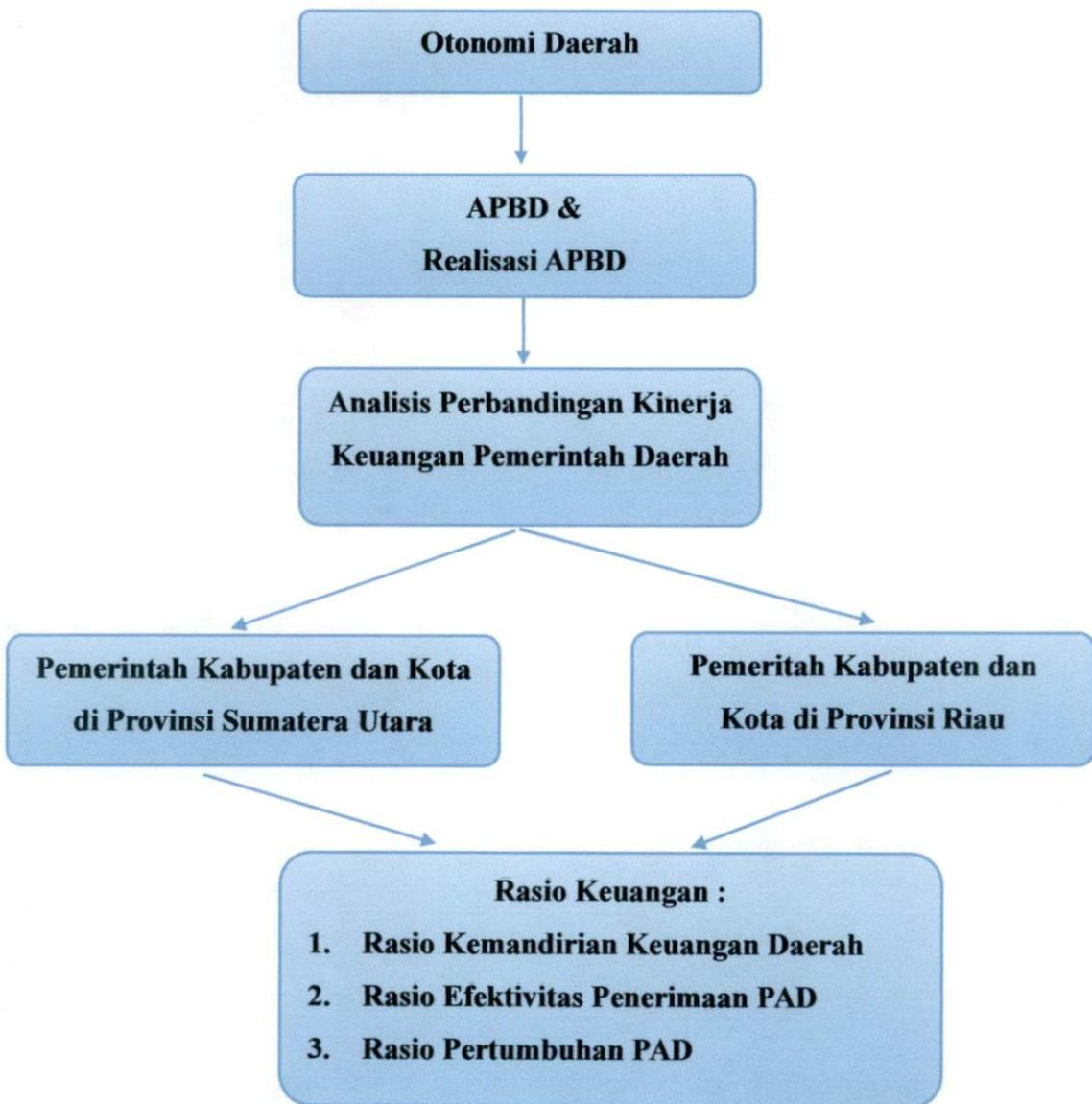
6.	Ninik Wahyuni (2010)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang	Kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
----	----------------------	---	-------------------------------------	---

Berdasarkan review dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian Umminah (2013) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Provinsi Aceh dan Provinsi Riau Tahun 2010-2012 dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”. Namun populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

2.3 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan skema kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif komparatif. Studi deskriptif dilakukan untuk menganalisis data sehingga mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2007). Sedangkan penelitian komparatif menurut Sugiyono (2005) adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini melakukan perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Berikut ini merupakan daftar kabupaten dan kota yang terdapat dalam Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau :

Tabel 3.1**Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumut**

1. Kabupaten Asahan	18. Kabupaten Pakpak Bharat
2. Kabupaten Batubara	19. Kabupaten Samosir
3. Kabupaten Dairi	20. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kabupaten Deli Serdang	21. Kabupaten Simalungun
5. Kabupaten Humbang Hasundutan	22. Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Kabupaten Tanah Karo	23. Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Kabupaten Labuhanbatu	24. Kabupaten Tapanuli Utara
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan	25. Kabupaten Toba Samosir
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara	26. Kota Binjai
10. Kabupaten Langkat	27. Kota Gunung Sitoli
11. Kabupaten Mandailing Natal	28. Kota Medan
12. Kabupaten Nias	29. Kota Padangsidimpuan
13. Kabupaten Nias Barat	30. Kota Pematangsiantar
14. Kabupaten Nias Selatan	31. Kota Sibolga
15. Kabupaten Nias Utara	32. Kota Tanjungbalai
16. Kabupaten Padang Lawas	33. Kota Tebing Tinggi
17. Kabupaten Padang Lawas Utara	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.2**Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Riau**

1. Kabupaten Bengkalis	7. Kabupaten Rokan Hilir
2. Kabupaten Indragiri Hilir	8. Kabupaten Rokan Hulu
3. Kabupaten Indragiri Hulu	9. Kabupaten Siak
4. Kabupaten Kampar	10. Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Kabupaten Kuantan Singingi	11. Kota Dumai
6. Kabupaten Pelalawan	12. Kota Pekanbaru

Sumber : BPS Provinsi Riau

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Komponen-komponen pada variabel kinerja keuangan daerah diteliti menggunakan rasio keuangan pada APBD, seperti rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, dan rasio pertumbuhan PAD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan (Lungan, 2006). Data kuantitatif dalam penelitian ini diambil dari laporan target dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013.

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer, biasanya dalam publikasi, misalnya peneliti menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah (Lungan, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari publikasi data keuangan daerah di website resmi DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Kemenkeu RI, yaitu <http://djpk.deukeu.go.id>.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode dokumentasi, teknik dokumentasi yang dimaksud dilakukan melalui pencatatan data-data yang diperlukan dan mengakses website yang menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
2. Studi pustaka, dalam melakukan studi pustaka penulis berusaha memperoleh pemahaman dari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk mengukur kinerja keuangan dalam organisasi pemerintah, terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio

ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Menurut Halim (2007) rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Moh. Mahsun (2006)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2007) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio efektivitas penerimaan PAD

Rasio efektivitas penerimaan PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2007) rasio efektivitas penerimaan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Melisa Anastasia (2012)

3. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2007) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rasio yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah rasio pertumbuhan PAD. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target PAD setiap periode. Menurut Ihyaul Ulum (2009) rasio pertumbuhan PAD dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

Keterangan

X_n : Tahun yang dihitung

X_{n-1} : Tahun sebelumnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 **Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia.. Secara geografis, wilayah Sumatera Utara berada pada jalur perdagangan internasional. Provinsi Sumatera Utara berada dekat dengan dua negara ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura, serta diapit oleh 3 provinsi dengan batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Nama-nama kabupaten dan kota tersebut antara lain Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Dairi, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasudutan, Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Langkat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba Samosir,

Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, dan Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan sumber dari BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, luas Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 Km². Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 6.620,70 Km² sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah kota Sibolga sebesar 10,77 Km². Provinsi Sumatera Utara memiliki total jumlah penduduk 13.326.307 jiwa yang terdiri dari 6.648.190 jiwa laki-laki dan 6.678.117 jiwa perempuan. Potensi investasi di Provinsi Sumatera Utara terbagi atas beberapa sektor, antara lain :

1. Sektor Perikanan dan Kelautan.
2. Sektor Pertanian dan Perkebunan.

Produk-produk unggulan perkebunan dan pertanian yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara seperti tembakau deli, kelapa sawit (CPO), karet mentah/karet olahan, coklat (kakao), kopi, minyak atsiri, dsb.

3. Sektor peternakan.

Di sektor peternakan, komoditas utama yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara adalah sapi, kambing, domba, babi, dan unggas.

4. Sektor Pertambangan

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kekayaan tambang. Survey 2006 mencatat bahwa terdapat 27 jenis barang tambang nonlogam (golongan C), 15 jenis barang tambang logam dan enam jenis minyak, gas (migas) dan energi. Barang tambang non logam antara lain batu gamping,

dolomite, pasir kuarsa, belerang, kaolin, diatomea dan bentonit. Sedangkan barang tambang logam mencakup emas, perak, tembaga dan timah hitam. Sementara potensi migas dan energi antara lain minyak bumi, gas alam dan panas bumi.

5. Sektor Pariwisata

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW), yang mempunyai 399 objek wisata yang tersebar di seluruh daerah.

Berikut ini merupakan perkembangan penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.1
Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	PAD (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Asahan	31.844	37.895	53.692	41.144
2.	Kab. Batubara	13.241	16.558	N.A	14.900
3.	Kab. Dairi	17.673	20.912	29.933	22.839
4.	Kab. Deli Serdang	213.792	291.018	328.348	277.719
5.	Kab. Humbang Hasudutan	12.870	17.902	17.633	16.135
6.	Kab. Tanah Karo	35.363	41.243	46.343	40.983
7.	Kab. Labuhanbatu	50.959	59.439	49.785	53.394
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	17.081	18.977	26.702	20.920
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	10.518	18.971	25.651	18.380
10.	Kab. Langkat	34.541	129.243	65.521	76.435
11.	Kab. Mandailing Natal	27.526	21.274	47.666	32.155
12.	Kab. Nias	18.944	29.822	44.726	31.164
13.	Kab. Nias Barat	2.864	5.461	7.224	5.183
14.	Kab. Nias Selatan	23.031	15.592	N.A	19.311
15.	Kab. Nias Utara	6.655	5.671	8.857	7.061
16.	Kab. Padang Lawas	7.628	9.881	23.140	13.550
17.	Kab Padang Lawas Utara	8.728	12.798	5.805	9.111

18.	Kab. Pakpak Bharat	6.306	6.353	9.081	7.247
19.	Kab. Samosir	14.202	17.460	26.661	19.441
20.	Kab Serdang Bedagai	35.894	39.275	50.372	41.847
21.	Kab. Simalungun	42.543	61.246	97.915	67.235
22.	Kab. Tapanuli Selatan	57.464	56.418	69.220	61.034
23.	Kab. Tapanuli Tengah	18.210	21.137	23.211	20.852
24.	Kab. Tapanuli Utara	36.063	34.023	75.909	48.665
25.	Kab. Toba Samosir	14.118	16.543	19.803	16.821
Rata-rata Kabupaten		30.322	40.204	50.139	40.222
26.	Kota Binjai	26.470	48.178	49.173	41.274
27.	Kota Gunung Sitoli	6.051	9.330	N.A	7.690
28.	Kota Medan	995.073	1.147.124	1.206.170	1.116.122
29.	Kota Padangsidimpuan	21.465	23.622	35.018	26.702
30.	Kota Pematangsiantar	44.793	49.915	61.358	52.022
31.	Kota Sibolga	21.663	26.698	29.458	25.940
32.	Kota Tanjungbalai	27.089	27.702	31.921	28.904
33.	Kota Tebing Tinggi	32.739	47.331	53.200	44.423
Rata-rata Kota		146.918	172.488	209.471	176.292
Rata-rata Kabupaten/Kota		58.588	72.273	87.316	72.726

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.1**, umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya. Beberapa daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi penerimaan PAD antara lain Kab. Humbang Hasudutan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Langkat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Tapanuli Utara. Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki PAD tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. PAD yang diterima Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan sebagian besar bersumber dari pajak daerah.

Rata-rata penerimaan PAD daerah kota jauh lebih tinggi dibandingkan

daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara karena daerah kota selalu mengalami peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya. Secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor).

Dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal di daerah. Dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara umumnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel penerimaan dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.2
Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Asahan	629.142	751.913	878.628	753.228
2.	Kab. Batubara	442.376	524.477	N.A	483.426
3.	Kab. Dairi	443.722	521.886	600.146	521.918
4.	Kab. Deli Serdang	1.064.006	1.237.551	1.401.726	1.234.428
5.	Kab. Humbang Hasudutan	374.194	439.194	519.014	444.134
6.	Kab. Tanah Karo	515.454	615.142	704.069	611.555
7.	Kab. Labuhanbatu	460.032	591.321	621.030	557.461
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	350.529	413.225	510.631	424.795
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	416.851	481.110	541.453	479.805
10.	Kab. Langkat	928.573	1.060.399	1.233.279	1.074.084
11.	Kab. Mandailing Natal	539.496	624.737	702.429	622.221
12.	Kab. Nias	336.708	351.220	415.008	367.645
13.	Kab. Nias Barat	251.084	305.295	303.732	286.704
14.	Kab. Nias Selatan	399.717	471.771	N.A	435.744
15.	Kab. Nias Utara	282.795	318.496	363.089	321.460
16.	Kab. Padang Lawas	316.710	410.794	442.927	390.144
17.	Kab. Padang Lawas Utara	337.797	415.651	251.604	335.017
18.	Kab. Pakpak Bharat	250.595	282.389	350.859	294.614
19.	Kab. Samosir	334.265	380.799	441.138	385.401
20.	Kab. Serdang Bedagai	572.521	671.124	742.398	662.015
21.	Kab. Simalungun	828.603	1.021.460	1.119.108	989.724
22.	Kab. Tapanuli Selatan	450.931	547.420	611.458	536.603
23.	Kab. Tapanuli Tengah	421.698	507.033	603.804	510.845
24.	Kab. Tapanuli Utara	488.403	567.953	1.275.095	777.151
25.	Kab. Toba Samosir	380.231	463.268	499.263	447.587
	Rata-rata Kabupaten	472.657	559.025	657.908	563.197
26.	Kota Binjai	401.835	482.078	530.809	471.574
27.	Kota Gunung Sitoli	313.141	378.060	N.A	345.600
28.	Kota Medan	1.422.442	1.417.186	1.506.316	1.448.648
29.	Kota Padangsidimpuan	357.577	421.732	489.006	422.772
30.	Kota Pematangsiantar	403.598	494.526	559.741	485.955
31.	Kota Sibolga	290.946	333.435	388.296	337.559
32.	Kota Tanjungbalai	312.341	350.520	418.300	360.387

33.	Kota Tebing Tinggi	304.033	357.857	427.473	363.121
	Rata-rata Kota	475.739	529.424	617.134	540.766
	Rata-rata Kabupaten/Kota	473.404	551.849	648.394	557.883

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.2**, terdapat beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi penerimaan dana perimbangan yaitu Kab. Nias Barat, Kab Padang Lawas Utara dan Kota Medan . Rata-rata penerimaan dana perimbangan daerah kabupaten lebih besar dibandingkan daerah kota di Provinsi Sumatera.

Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki dana perimbangan terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan sebagian besar berasal dana alokasi umum (DAU). Kota Medan memiliki dana perimbangan yang cukup besar juga dikarenakan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara juga bervariasi selama periode 2011-2013. Berikut ini merupakan tabel penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.3
Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Lain-lain Pendapatan yang Sah (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Asahan	17.228	2.277	14.488	11.331
2.	Kab. Batubara	18.717	55.713	N.A	37.215
3.	Kab. Dairi	9.044	12.894	10.945	10.961
4.	Kab. Deli Serdang	26.326	61.321	11.875	33.174
5.	Kab. Humbang Hasudutan	17.358	41.308	91.159	49.942
6.	Kab. Tanah Karo	7.844	26.413	66.971	33.743
7.	Kab. Labuhanbatu	5.082	37.471	61.425	34.659
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	12.597	40.822	0	17.806
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	4.697	124.926	188.033	105.885
10.	Kab. Langkat	18.277	49.643	70.674	46.198
11.	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	0
12.	Kab. Nias	2.869	19.590	0	7.486
13.	Kab. Nias Barat	28.720	10.112	0	12.944
14.	Kab. Nias Selatan	4.142	0	N.A	2.071
15.	Kab. Nias Utara	4.718	26.301	18.366	16.462
16.	Kab. Padang Lawas	18.669	36.807	40.495	31.990
17.	Kab. Padang Lawas Utara	32.254	121.536	0	51.263
18.	Kab. Pakpak Bharat	4.697	10.248	16.339	10.428
19.	Kab. Samosir	60.796	44.613	57.381	54.263
20.	Kab. Serdang Bedagai	26.148	75.979	73.353	58.493
21.	Kab. Simalungun	16.558	169.440	48.543	78.180
22.	Kab. Tapanuli Selatan	6.986	1.116	0	2.700
23.	Kab. Tapanuli Tengah	20.086	109.334	152.737	94.052
24.	Kab. Tapanuli Utara	6.715	47.880	353.468	136.021
25.	Kab. Toba Samosir	19.265	176.271	126.739	107.425
	Rata-rata Kabupaten	15.592	52.081	61.000	42.891
26.	Kota Binjai	43.629	88.174	50.042	60.615
27.	Kota Gunung Sitoli	4.207	871	N.A	2.539
28.	Kota Medan	329.845	433.117	0	254.320
29.	Kota Padangsidimpuan	11.397	40.764	27.858	26.673
30.	Kota Pematangsiantar	15.653	48.973	16.095	26.907
31.	Kota Sibolga	1.061	28.037	10.205	13.101

32.	Kota Tanjungbalai	40.727	80.872	57.767	59.789
33.	Kota Tebing Tinggi	74.498	36.648	60.770	57.306
	Rata-rata Kota	65.127	94.682	31.820	63.876
	Rata-rata Kabupaten/Kota	27.600	62.408	54.191	48.067

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.3**, umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan sebagian besar berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kota Medan memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah cukup besar juga dikarenakan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

4.1.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumut :

Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan Daerah (%)				Pola Hubungan
		2011	2012	2013	Rata-Rata	
1.	Kab. Asahan	3,77	3,64	4,46	3,96	Instruktif
2.	Kab. Batubara	2,35	2,53	N.A	2,44	Instruktif
3.	Kab. Dairi	3,21	3,41	4,16	3,59	Instruktif
4.	Kab. Deli Serdang	13,16	15,70	15,66	14,84	Instruktif
5.	Kab. Humbang Hasudutan	2,77	3,25	2,81	2,94	Instruktif
6.	Kab. Tanah Karo	5,44	5,47	5,10	5,34	Instruktif
7.	Kab. Labuhanbatu	7,60	7,77	6,07	7,15	Instruktif
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	3,93	3,75	4,31	4,00	Instruktif
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	1,94	2,82	3,40	2,72	Instruktif
10.	Kab. Langkat	3,11	9,37	4,21	5,56	Instruktif
11.	Kab. Mandailing Natal	4,03	2,69	5,47	4,06	Instruktif
12.	Kab. Nias	4,63	7,11	9,69	7,14	Instruktif
13.	Kab. Nias Barat	1,01	1,69	2,21	1,64	Instruktif
14.	Kab. Nias Selatan	4,68	2,90	N.A	3,79	Instruktif
15.	Kab. Nias Utara	2,01	1,62	2,16	1,93	Instruktif
16.	Kab. Padang Lawas	1,93	2,04	4,29	2,75	Instruktif
17.	Kab Padang Lawas Utara	2,04	2,20	2,09	2,11	Instruktif
18.	Kab. Pakpak Bharat	1,95	2,04	2,32	2,10	Instruktif
19.	Kab. Samosir	3,41	3,90	5,03	4,11	Instruktif
20.	Kab Serdang Bedagai	4,60	4,48	5,10	4,73	Instruktif
21.	Kab. Simalungun	3,94	4,39	6,67	5,00	Instruktif
22.	Kab. Tapanuli Selatan	8,80	7,77	8,54	8,37	Instruktif
23.	Kab. Tapanuli Tengah	3,28	2,99	2,66	2,98	Instruktif
24.	Kab. Tapanuli Utara	5,33	4,69	4,45	4,82	Instruktif
25.	Kab. Toba Samosir	2,90	2,52	2,76	2,73	Instruktif
	Rata-rata Kabupaten	4,07	4,43	4,94	4,48	Instruktif
26.	Kota Binjai	4,57	6,99	6,91	6,16	Instruktif
27.	Kota Gunung Sitoli	1,64	2,13	N.A	1,89	Instruktif
28.	Kota Medan	36,22	38,27	36,92	37,14	Konsulatif
29.	Kota Padangsidimpuan	4,50	4,37	5,59	4,82	Instruktif
30.	Kota Pematangsiantar	7,92	7,46	8,39	7,92	Instruktif
31.	Kota Sibolga	5,61	6,49	6,37	6,16	Instruktif

32.	Kota Tanjungbalai	6,94	5,95	5,88	6,26	Instruktif
33.	Kota Tebing Tinggi	7,96	9,82	8,92	8,90	Instruktif
	Rata-rata Kota	9,42	10,19	11,28	10,30	Instruktif
	Rata-rata Kabupaten/Kota	5,37	5,82	6,42	5,87	Instruktif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.4**, umumnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2011-2013. Semua kota di Provinsi Sumatera Utara selalu mengalami fluktuasi tingkat kemandirian daerah kecuali Kota Gunung Sitoli.

Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah paling tinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat ketergantungan paling rendah pada pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Rata-rata tingkat kemandirian daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2013 adalah sebesar 4,48% dan 10,30%, yang masih dikategorikan “rendah sekali”, karena hanya berkisar pada angka “0-25%”. Dengan demikian pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota di Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat dikategorikan kedalam pola instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peran daerah kabupaten dan daerah kota

dalam membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah.

Terdapat keistimewaan pada salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara, memiliki pola hubungan “konsultatif” dengan pemerintah pusat. Pola hubungan konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah kota lebih baik dibandingkan tingkat kemandirian daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ini terlihat dari rata-rata rasio kemandirian daerah kota (10,30%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio kemandirian kabupaten (4,48%) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah kota lebih bisa memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung banyak pada dana perimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan dibandingkan daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut ini merupakan tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Utara :

Tabel 4.5
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD (%)				Kriteria
		2011	2012	2013	Rata-Rata	
1.	Kab. Asahan	119,66	118,84	99,36	112,62	Sangat Efektif
2.	Kab. Batubara	81,15	94,14	N.A	87,64	Cukup Efektif
3.	Kab. Dairi	121,85	101,97	80,20	101,34	Sangat Efektif
4.	Kab. Deli Serdang	71,23	76,57	70,61	72,80	Kurang Efektif
5.	Kab. Humbang Hasudutan	70,54	166,60	115,91	117,69	Sangat Efektif
6.	Kab. Tanah Karo	113,53	88,08	96,21	99,27	Efektif
7.	Kab. Labuhanbatu	104,17	118,88	74,80	99,28	Efektif
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	169,92	101,34	20,49	97,25	Efektif
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	134,70	145,21	110,53	130,15	Sangat Efektif
10.	Kab. Langkat	89,40	218,02	95,00	134,14	Sangat Efektif
11.	Kab. Mandailing Natal	110,10	47,28	101,42	86,27	Cukup Efektif
12.	Kab. Nias	187,72	124,21	146,49	152,81	Sangat Efektif
13.	Kab. Nias Barat	143,21	91,01	88,09	107,44	Sangat Efektif
14.	Kab. Nias Selatan	230,31	103,90	N.A	167,10	Sangat Efektif
15.	Kab. Nias Utara	332,76	113,42	70,86	172,35	Sangat Efektif
16.	Kab. Padang Lawas	42,06	35,07	89,33	55,49	Tidak Efektif
17.	Kab Padang Lawas Utara	57,87	87,20	37,46	60,84	Kurang Efektif
18.	Kab. Pakpak Bharat	125,00	101,32	97,27	107,86	Sangat Efektif
19.	Kab. Samosir	69,04	124,15	133,25	108,82	Sangat Efektif
20.	Kab Serdang Bedagai	100,52	95,86	93,65	96,68	Efektif
21.	Kab. Simalungun	72,80	54,15	153,62	93,52	Efektif
22.	Kab. Tapanuli Selatan	150,72	100,24	108,01	119,66	Sangat Efektif
23.	Kab. Tapanuli Tengah	108,98	81,30	87,06	92,45	Efektif
24.	Kab. Tapanuli Utara	266,57	237,88	210,05	238,17	Sangat Efektif
25.	Kab. Toba Samosir	117,34	87,47	104,19	103,00	Sangat Efektif
	Rata-rata Kabupaten	127,65	108,56	99,30	111,84	Sangat Efektif
26.	Kota Binjai	80,11	136,95	106,57	107,88	Sangat Efektif
27.	Kota Gunung Sitoli	81,11	118,27	N.A	99,69	Efektif
28.	Kota Medan	119,92	81,00	68,58	89,83	Cukup Efektif
29.	Kota Padangsidimpuan	108,66	102,00	83,02	97,89	Efektif
30.	Kota Pematangsiantar	102,62	83,15	85,68	90,48	Efektif

31.	Kota Sibolga	121,43	126,53	96,31	114,76	Sangat Efektif
32.	Kota Tanjungbalai	122,32	86,96	99,64	102,98	Sangat Efektif
33.	Kota Tebing Tinggi	116,96	163,55	146,66	142,39	Sangat Efektif
	Rata-rata Kota	106,64	112,30	98,07	105,67	Sangat Efektif
	Rata-rata Kabupaten/Kota	122,55	109,47	99,01	110,35	Sangat Efektif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.5**, umumnya rasio efektivitas penerimaan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2011-2013. Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat efektivitas penerimaan PAD paling tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Tebing Tinggi.

Rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD kabupaten sebesar 111,84%, lebih tinggi dibandingkan dengan efektivitas PAD pada kota yang hanya sebesar 105,67%. Ini memperlihatkan bahwa selama anggaran periode 2011-2013, kinerja pemerintah kabupaten lebih baik dibandingkan dengan kinerja pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara dalam penerimaan PAD.

Rata-rata rasio efektivitas kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera telah dikategorikan “sangat efektif” yang artinya pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas untuk merealisasikan PAD yang dianggarkan sudah baik. Adapun satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mampu mencapai target dalam merealisasikan PAD yaitu Kabupaten Padang Lawas. Dikatakan tidak mampu mencapai target dalam merealisasikan PAD karena rasio efektivitas Kabupaten Padang Lawas dikategorikan tidak efektif.

4.1.3 Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2013

Rasio pertumbuhan PAD dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam pencapaian target PAD dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan PAD dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PAD (100%)	
		2011 - 2012	2012 - 2013
1.	Kab. Asahan	15,97	29,42
2.	Kab. Batubara	20,03	N.A
3.	Kab. Dairi	15,48	30,14
4.	Kab. Deli Serdang	26,54	11,37
5.	Kab. Humbang Hasudutan	28,11	-1,53
6.	Kab. Tanah Karo	14,26	11,00
7.	Kab. Labuhanbatu	14,27	-19,39
8.	Kab. Labuhanbatu Selatan	9,99	28,93
9.	Kab. Labuhanbatu Utara	44,56	26,04
10.	Kab. Langkat	73,27	-97,25
11.	Kab. Mandailing Natal	-29,39	55,37
12.	Kab. Nias	36,48	33,32
13.	Kab. Nias Barat	47,55	24,40
14.	Kab. Nias Selatan	-47,71	N.A
15.	Kab. Nias Utara	-17,36	35,97
16.	Kab. Padang Lawas	22,80	57,30
17.	Kab. Padang Lawas Utara	31,80	-120,46
18.	Kab. Pakpak Bharat	0,74	30,04

19.	Kab. Samosir	18,66	34,51
20.	Kab Serdang Bedagai	8,61	22,03
21.	Kab. Simalungun	30,54	37,45
22.	Kab. Tapanuli Selatan	-1,85	18,50
23.	Kab. Tapanuli Tengah	13,85	8,94
24.	Kab. Tapanuli Utara	-6,00	55,18
25.	Kab. Toba Samosir	14,66	16,46
Rata-rata Kabupaten		15,43	14,25
26.	Kota Binjai	45,06	2,02
27.	Kota Gunung Sitoli	35,14	N.A
28.	Kota Medan	13,26	4,90
29.	Kota Padangsidempuan	9,13	32,54
30.	Kota Pematangsiantar	10,26	18,65
31.	Kota Sibolga	18,86	9,37
32.	Kota Tanjungbalai	2,21	13,22
33.	Kota Tebing Tinggi	30,83	11,03
Rata-rata Kota		20,59	13,10
Rata-rata Kabupaten/Kota		16,68	13,98

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.6**, umumnya daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif, khususnya daerah kota. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah kota di Provinsi Sumatera Utara dalam mempertahankan keberhasilan pencapaian target PAD setiap periodenya sudah baik.

Beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami pertumbuhan PAD negatif periode 2011-2012 adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PAD negatif periode 2012-2013 antara lain Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.2 **Gambaran Umum Provinsi Riau**

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi Riau beribukotakan Pekanbaru. Secara geografis, Provinsi Riau memiliki batas-batas wilayah, antara lain :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Secara geoekonomi Provinsi Riau berhadapan langsung dengan 2 negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, yang juga ikut bekerja sama dengan beberapa Negara ASEAN dalam pembangunan tingkat ekonomi regional, seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangel).

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.150,16 Km², dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Provinsi Riau terakhir pada tahun 2013 berjumlah 6.125.283 orang, yang terdiri dari 3.162.525 laki-laki dan 2.962.758 perempuan. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi Riau terbagi atas

beberapa sektor yaitu :

1. Sektor Perkebunan.

Komoditas unggulan pada sektor ini adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, dan pinang.

2. Sektor Pertanian

Komoditas dalam dektor pertanian terdiri atas padi, jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

3. Sektor Peternakan.

Komoditas yang terdapat di sektor peternakan Provinsi Riau antara lain babi, domba, kambing, dll.

Berikut ini merupakan tabel perkembangan penerimaan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Riau:

Tabel 4.7

Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	PAD (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Bengkalis	206.232	205.980	181.667	197.960
2.	Kab. Indragiri Hilir	55.880	58.011	80.512	64.801
3.	Kab. Indragiri Hulu	46.851	57.348	57.348	53.849
4.	Kab. Kampar	96.909	110.077	157.869	121.618
5.	Kab. Kuantan Singingi	25.116	36.165	46.272	35.851
6.	Kab. Pelalawan	46.650	55.630	71.444	57.908
7.	Kab. Rokan Hilir	63.252	66.423	82.962	70.879
8.	Kab. Rokan Hulu	34.243	54.370	57.064	48.559
9.	Kab. Siak	198.010	346.604	348.619	297.744
10.	Kab. Kepulauan Meranti	26.519	32.270	40.193	32.994
	Rata-rata Kabupaten	79.966	102.288	112.395	98.216
11.	Kota Dumai	113.392	115.396	157.466	128.751
12.	Kota Pekanbaru	223.232	309.534	370.922	301.229
	Rata-rata Kota	168.312	212.465	264.194	214.990
	Rata-rata Kabupaten/Kota	94.690	120.651	137.695	117.679

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada Tabel 4.7, umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan penerimaan PAD, namun terdapat satu kabupaten yang selalu mengalami penurunan penerimaan PAD, yaitu Kabupaten Bengkalis. Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki PAD tertinggi adalah Kabupaten Siak. Sumber penerimaan PAD Kabupaten Siak sebagian besar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini didukung karena terdapat beberapa industri yang terdapat di Kabupaten Siak yaitu Surya Dumai, PT Indah Kiat, dan PT. Chevron.

Penerimaan PAD kota di Provinsi Riau selama periode 2011-2013 selalu mengalami peningkatan. Kota yang memiliki PAD tertinggi adalah Kota

Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sumber penerimaan PAD Kota Pekanbaru sebagian besar berasal dari komponen pajak daerah. Jika dilihat perbandingan rata-rata penerimaan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Riau, daerah kota memiliki PAD lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten di Provinsi Riau.

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal di daerah. Dana perimbangan yang diperoleh kabupaten dan kota di Provinsi Riau selalu berfluktuasi tiap tahunnya. Perkembangan penerimaan dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Bengkalis	3.150.077	3.190.619	2.768.805	3.036.500
2.	Kab. Indragiri Hilir	1.208.042	1.135.442	1.323.840	1.222.441
3.	Kab. Indragiri Hulu	982.901	1.165.563	1.165.563	1.104.676
4.	Kab. Kampar	1.477.098	1.758.213	1.859.204	1.698.171
5.	Kab. Kuantan Singingi	924.216	1.039.226	1.029.989	997.810
6.	Kab. Pelalawan	974.766	1.121.456	1.112.369	1.069.530
7.	Kab. Rokan Hilir	1.495.443	1.738.854	1.760.245	1.664.847
8.	Kab. Rokan Hulu	947.862	1.070.482	1.082.035	1.033.460
9.	Kab. Siak	1.489.288	1.768.145	1.768.817	1.675.417
10.	Kab. Kepulauan Meranti	832.483	937.804	914.869	895.052
Rata-rata Kabupaten		1.348.218	1.492.580	1.478.574	1.439.791
11.	Kota Dumai	654.479	732.137	810.499	732.372
12.	Kota Pekanbaru	1.053.472	1.238.475	1.285.984	1.192.644
Rata-rata Kota		853.976	985.306	1.048.241	962.508
Rata-rata Kabupaten/Kota		1.265.844	1.408.034	1.406.852	1.360.243

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.8**, rata-rata penerimaan dana perimbangan kabupaten lebih tinggi dibandingkan penerimaan dana perimbangan kota di Provinsi Riau. Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki dana perimbangan terbesar adalah Kabupaten Bengkalis. Dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Bengkalis sebagian besar berasal dari dana bagi hasil (DBH) bukan pajak /SDA, karena Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Daerah kota di Provinsi Riau yang memiliki dana perimbangan paling besar adalah Kota Pekanbaru selaku ibukota Provinsi Riau. Sumber penerimaan dana perimbangan yang diterima Kota Pekanbaru sebagian besar berasal dari dana bagi hasil (DBH) bukan pajak/SDA dan dana alokasi umum (DAU).

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah kabupaten/kota di Provinsi Riau juga bervariasi selama periode 2011-2013. Berikut ini merupakan tabel perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah kabupaten/kota di Provinsi Riau i:

Tabel 4.9
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (dalam juta rupiah)			
		2011	2012	2013	Rata-Rata
1.	Kab. Bengkalis	4.216	11.363	21.825	12.468
2.	Kab. Indragiri Hilir	51.668	161.854	0	71.174
3.	Kab. Indragiri Hulu	0	161.539	161.539	107.693
4.	Kab. Kampar	0	0	0	0
5.	Kab. Kuantan Singingi	95.818	6.025	155.586	85.810
6.	Kab. Pelalawan	25.719	134.965	154.647	105.111
7.	Kab. Rokan Hilir	462	7.468	111.974	39.968
8.	Kab. Rokan Hulu	918	6.885	0	2.601
9.	Kab. Siak	3.932	0	156.351	53.428
10.	Kab. Kepulauan Meranti	669	9.121	95.512	35.100
Rata-rata Kabupaten		18.340	49.922	85.743	51.335
11.	Kota Dumai	155.684	208.671	0	121.452
12.	Kota Pekanbaru	21.011	12.192	10.098	14.433
Rata-rata Kota		88.348	110.431	5.049	67.943
Rata-rata Kabupaten/Kota		30.008	60.007	72.294	54.103

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.9**, umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami fluktuasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah paling tinggi adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu sebagian besar berasal dari dana bagi hasil (DBH) pajak dari provinsi dan pemda lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus., sedangkan Kota Dumai memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah yang besumber dari pendapatan lainnya.

Dilihat dari perbandingan antara rata-rata lain-lain pendapatan daerah

yang sah pada kabupaten dan kota di Provinsi Riau, daerah kota memiliki pendapatan lain-lain yang sah lebih besar dibandingkan daerah kabupaten di Provinsi Riau.

4.2.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dan juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berikut merupakan tabel rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau :

Tabel 4.10
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				Pola Hubungan
		2011	2012	2013	Rata-Rata	
1.	Kab. Bengkalis	5,89	5,79	5,84	5,84	Instruktif
2.	Kab. Indragiri Hilir	4,01	4,28	5,21	4,50	Instruktif
3.	Kab. Indragiri Hulu	4,12	4,14	4,14	4,13	Instruktif
4.	Kab. Kampar	5,54	5,32	6,96	5,94	Instruktif
5.	Kab. Kuantan Singingi	2,40	3,05	3,76	3,07	Instruktif
6.	Kab. Pelalawan	4,11	4,24	5,34	4,56	Instruktif
7.	Kab. Rokan Hilir	3,77	3,47	4,24	3,83	Instruktif
8.	Kab. Rokan Hulu	3,11	4,39	4,35	3,95	Instruktif
9.	Kab. Siak	10,99	15,41	15,33	13,91	Instruktif
10.	Kab. Kepulauan Meranti	2,88	3,13	3,83	3,28	Instruktif
Rata-rata Kabupaten		4,68	5,32	5,90	5,30	Instruktif
11.	Kota Dumai	11,73	10,68	14,47	12,29	Instruktif
12.	Kota Pekanbaru	14,53	16,78	18,59	16,63	Instruktif
Rata-rata Kota		13,13	13,73	16,53	14,46	Instruktif
Rata-rata Kab./Kota		6,09	6,72	7,67	6,83	Instruktif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.10**, umumnya tingkat kemandirian daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Beberapa kabupaten dan kota yang mengalami fluktuasi tingkat kemandirian daerah yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.

Kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah paling tinggi adalah Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Rata-rata tingkat kemandirian daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau sebesar 5,30% dan 14,46% , dan masih dikategorikan “rendah sekali”, karena

hanya berkisar pada angka “0-25%” sehingga pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dengan pemerintah pusat dikategorikan pola “instruktif” dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peran daerah dalam membiayai pelaksanaan program pemerintahan daerahnya.

Tingkat kemandirian daerah kota lebih baik dibandingkan tingkat kemandirian daerah kabupaten di Provinsi Riau yang dilihat dari rasio kemandirian daerah kota (14,46%) lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kemandirian daerah kabupaten (5,30%). Hal ini menunjukkan bahwa daerah kota lebih bisa memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung banyak pada dana perimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan dibandingkan daerah kabupaten di Provinsi Riau.

4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013

Rasio efektivitas penerimaan PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut ini merupakan tabel tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Riau :

Tabel 4.11
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD (%)				Kriteria
		2011	2012	2013	Rata-Rata	
1.	Kab. Bengkalis	146,22	99,63	77,27	107,71	Sangat Efektif
2.	Kab. Indragiri Hilir	145,60	117,30	138,28	133,73	Sangat Efektif
3.	Kab. Indragiri Hulu	195,83	210,20	149,64	185,22	Sangat Efektif
4.	Kab. Kampar	109,27	108,75	134,37	117,47	Sangat Efektif
5.	Kab. Kuantan Singingi	80,43	138,20	151,77	123,47	Sangat Efektif
6.	Kab. Pelalawan	130,14	154,70	127,83	137,56	Sangat Efektif
7.	Kab. Rokan Hilir	56,40	57,33	58,77	57,50	Tidak Efektif
8.	Kab. Rokan Hulu	123,01	164,73	125,97	137,90	Sangat Efektif
9.	Kab. Siak	105,50	188,37	180,01	157,96	Sangat Efektif
10.	Kab. Kepulauan Meranti	155,99	136,28	131,51	141,26	Sangat Efektif
	Rata-rata Kabupaten	124,84	137,55	127,54	129,98	Sangat Efektif
11.	Kota Dumai	144,56	128,30	116,32	129,73	Sangat Efektif
12.	Kota Pekanbaru	98,65	123,15	101,73	107,84	Sangat Efektif
	Rata-rata Kota	121,60	125,73	109,03	118,79	Sangat Efektif
	Rata-rata Kabupaten/Kota	124,30	135,58	124,45	128,11	Sangat Efektif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.11**, umumnya tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. Hampir semua daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki rasio efektivitas penerimaan PAD yang dikategorikan “sangat efektif”, kecuali Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang memiliki tingkat efektivitas penerimaan PAD paling tinggi adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Kabupaten di Provinsi Riau yang tidak mampu mencapai target realisasi PAD adalah Kabupaten Rokan Hilir yang rasio efektivitas penerimaan PAD nya dikategorikan “tidak efektif” karena rasionya berada

dikisaran <100% yaitu 57,50%.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten (129,98%) lebih tinggi dibandingkan tingkat efektivitas penerimaan PAD kota (118,79%) di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan daripada pemerintah kota di Provinsi Riau. Namun rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Riau sama-sama dikategorikan “sangat efektif” , yang berarti bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau sudah efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan.

4.2.3 Analisis Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2011-2013

Rasio pertumbuhan PAD dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam pencapaian target PAD dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan PAD dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau :

Tabel 4.12

Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PAD (%)	
		2011-2012	2012-2013
1.	Kab. Bengkalis	-0,12	-13,38
2.	Kab. Indragiri Hilir	3,67	27,95
3.	Kab. Indragiri Hulu	18,30	0,00
4.	Kab. Kampar	11,96	30,27
5.	Kab. Kuantan Singingi	30,55	21,84
6.	Kab. Pelalawan	16,14	22,14
7.	Kab. Rokan Hilir	4,77	19,94
8.	Kab. Rokan Hulu	37,02	4,72
9.	Kab. Siak	42,87	0,58
10.	Kab. Kepulauan Meranti	91,43	-670,12
Rata-rata Kabupaten		25,66	-55,61
11.	Kota Dumai	1,74	26,72
12.	Kota Pekanbaru	-591,75	91,30
Rata-rata Kota		-295,01	59,01
Rata-rata Kab./Kota		-27,78	-36,50

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.12**, umumnya pertumbuhan PAD di daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang positif. Kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang mengalami pertumbuhan PAD negatif pada periode 2011-2012 adalah Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Sedangkan kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami pertumbuhan PAD negatif periode 2012-2013 adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten di Provinsi Riau mengalami penurunan sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD kota di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya atau berkurangnya kemampuan pemerintah daerah kabupaten di Provinsi

Riau dalam mempertahankan keberhasilan pencapaian target PAD setiap periodenya, sedangkan kemampuan pemerintah daerah kota di Provinsi Riau dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target PAD semakin baik setiap periodenya.

4.3 Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Periode 2011-2013

Perbandingan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Berikut ini merupakan tabel perbandingan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau :

Tabel 4.13

Perbandingan Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau

Provinsi	Tahun			Rata-rata (%)	Pola Hubungan
	2011	2012	2013		
Kabupaten					
Sumut	4,07	4,43	4,94	4,48	Instruktif
Riau	4,68	5,32	5,90	5,30	Instruktif
Kota					
Sumut	9,42	10,19	11,28	10,30	Instruktif
Riau	13,13	13,73	16,53	14,46	Instruktif
Kabupaten/ Kota					
Sumut	5,37	5,82	6,42	5,87	Instruktif
Riau	6,09	6,72	7,67	6,83	Instruktif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.13**, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten, daerah kota maupun kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau lebih mampu memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung banyak pada dana perimbangan dalam pelaksanaan pemerintahannya dibandingkan daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara.

Namun pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat dikategorikan kedalam pola instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peran daerah kota dalam membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sama halnya dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah, rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini merupakan tabel perbandingan rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD daerah kabupaten dan daerah kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau :

Tabel 4.14

Perbandingan Rata-rata Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau

Provinsi	Tahun			Rata-rata (%)	Kriteria
	2011	2012	2013		
Kabupaten					
Sumut	127,65	108,56	99,30	111,84	Sangat Efektif
Riau	124,84	137,55	127,54	129,98	Sangat Efektif
Kota					
Sumut	106,64	112,30	98,07	105,67	Sangat Efektif
Riau	121,60	125,73	109,03	118,79	Sangat Efektif
Kabupaten dan Kota					
Sumut	122,55	109,47	99,01	110,35	Sangat Efektif
Riau	124,30	135,58	124,45	128,11	Sangat Efektif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil data olahan pada **Tabel 4.14**, umumnya rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau mengalami fluktuasi periode 2011-2013, namun rata-rata rasio penerimaan PAD daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

Rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sama-sama dikategorikan "sangat efektif", yang artinya kedua provinsi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam merealisasikan penerimaan PAD.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD :

Tabel 4.15

**Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau**

Provinsi	Tahun	
	2011-2012	2012- 2013
Kabupaten		
Sumut	15,43	14,25
Riau	25,66	-55,61
Kota		
Sumut	20,59	13,10
Riau	-295,01	59,01
Kabupaten dan Kota		
Sumut	16,68	13,98
Riau	-27,78	-36,50

Sumber: DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Berdasarkan hasil olahan data pada **Tabel 4.15**, rata-rata pertumbuhan PAD periode 2011-2012 daerah kabupaten di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD daerah kota dan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan positif dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan negatif

Untuk periode 2012-2013 rata-rata pertumbuhan PAD daerah kota Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan rata-rata pertumbuhan daerah kabupaten dan kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan positif dan Provinsi Riau

mengalami pertumbuhan negatif.

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dibandingkan Provinsi Riau dalam mempertahankan keberhasilan pencapaian target PAD setiap tahunnya, karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengalami pertumbuhan PAD negatif selama periode 2011-2013, yang secara tidak langsung mengartikan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara lebih berkembang dibandingkan Provinsi Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara pada periode 2011-2013, sehingga disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih mampu memanfaatkan sumber PAD dan tidak hanya bergantung pada dana perimbangan dalam pelaksanaan pemerintahannya dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan pemerintah pusat sama-sama dikategorikan kedalam pola “instruktif” dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan peran daerah kabupaten/kota dalam membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah.
2. Berdasarkan rasio efektivitas penerimaan PAD, tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara pada periode 2011-2013, sehingga disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan

penerimaan PAD yang dianggarkan dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sama-sama dikategorikan “sangat efektif” yang artinya daerah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam merealisasikan penerimaan PAD yang dianggarkan.

3. Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD, tingkat pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dibandingkan Provinsi Riau karena daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selalu mengalami pertumbuhan PAD positif sedangkan Provinsi Riau lebih sering mengalami pertumbuhan PAD negatif pada periode 2011-2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam mempertahankan keberhasilan pencapaian target PAD setiap periodenya lebih baik dibandingkan Provinsi Riau. Pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Utara yang selalu positif secara tidak langsung mengartikan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara lebih berkembang dibandingkan Provinsi Riau.

5.2 Ketebatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan tiga rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas penerimaan PAD dan pertumbuhan PAD.

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan keadaan sosial, politik dan ekonomi pada daerah yang menjadi objek penelitian.

5.3 **Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau :
 - a. Untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau diharapkan lebih mengoptimalkan penerimaan sumber pendapatan daerah yang ada atau menambah sumber pendapatan daerah yang baru, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
 - b. Rata-rata efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sangat tinggi maka diharapkan pada pemerintah daerah agar bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan target penerimaan PAD.
 - c. Tingkat efektivitas penerimaan PAD kabupaten/kota yang tinggi seharusnya diimbangi dengan tingkat pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, sehingga diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau mampu mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan PAD setiap tahunnya dengan memanfaatkan setiap potensi pada komponen PAD.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang merupakan provinsi yang memiliki pendapatan cukup besar di Pulau Sumatera.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator penilaian kinerja keuangan daerah yang lebih kompleks, seperti rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Gumilar. (2012). *Kedaulatan Negara Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia di Tengah Globalisasi*. Makalah. HI Universitas Al Azhar Indonesia. Jakarta
- Agustina, Oesi. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Anastasia, Andi Melisa. (2012). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar
- Basuki. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Batafor, Gregorius Gehi. (2011). *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Denpasar
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

- Jusmawati. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi PAD*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar
- Lungan, Richard. (2006). *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Puspitasari, Ayu Febrianti. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Ramandei, P. (2009). *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang
- Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2011-2013*. <<http://www.djpk.depkeu.go.id>>

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia

Sedarmayanti. (2003). *Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Edisi 1. Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, Uma. (2007). *Metode Penelitian Bisnis 1*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta

Ulum, Ihyaul. (2009). *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umminah, Puti. (2013). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Provinsi Aceh dan Provinsi Riau Tahun 2010-2012 dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang

Wahyuni, Ninik. (2010). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Malik Ibrahim. Malang.

Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grafindo

www.riau.bps.go.id (Diakses pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 23.15)

www.sumut.bps.go.id (Diakses pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 23.00)

Lampiran 1

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah)

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pembiayaan Netto	Penerimaan	Pengeluaran
	Prov. Riau	1.502.361	2.683.190	90.350	4.275.901	1.831.203	2.637.055	4.468.258	192.357	262.357	70.000
1	Kab. Bengkalis	141.041	1.849.334	101.892	2.092.267	1.078.422	2.086.146	3.164.568	1.072.301	1.111.903	39.602
2	Kab. Indragiri Hilir	38.378	1.045.687	100.151	1.184.217	637.013	637.561	1.274.575	90.358	96.183	5.825
3	Kab. Indragiri Hulu	23.924	722.657	85.309	831.889	469.255	378.394	847.649	15.760	17.769	2.009
4	Kab. Kampar	88.686	1.300.911	78.042	1.467.639	892.132	847.552	1.739.684	272.045	272.045	-
5	Kab. Kuantan Singingi	31.226	794.584	53.113	878.923	540.480	352.889	893.369	14.445	14.445	-
6	Kab. Pelalawan	35.847	744.395	53.888	834.130	419.244	643.100	1.062.344	228.213	232.000	3.787
7	Kab. Rokan Hilir	112.158	1.419.854	87.423	1.619.435	638.494	1.414.999	2.053.493	519.000	525.000	6.000
8	Kab. Rokan Hulu	27.837	854.061	95.991	977.889	458.820	467.932	926.752	(51.136)	18.300	69.436
9	Kab. Siak	187.689	1.157.108	94.412	1.439.209	688.473	1.124.430	1.812.903	477.771	478.300	529
10	Kota Dumai	78.438	560.306	170.386	809.131	362.189	441.804	803.993	19.345	25.676	6.331
11	Kota Pekanbaru	226.297	1.081.299	201.638	1.509.234	742.138	748.328	1.490.467	(18.767)	16.233	35.000
12	Kab. Meranti	17.000	735.218	98.511	850.729	358.671	559.069	917.740	67.011	67.011	-

Lampiran 2

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov. Riau	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kampar	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kota Pekanbaru	Kab. Meranti
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendapatan	5.487.776	2.456.917	1.311.523	955.415	1.701.927	949.474	986.066	1.778.328	1.107.746	1.646.779	863.268	1.578.094	896.637
PAD	1.824.504	206.739	49.454	27.283	101.219	26.170	35.959	115.854	33.005	184.007	89.940	251.339	23.679
Dana Perimbangan	2.998.999	2.216.178	1.145.868	862.496	1.493.253	857.407	869.259	1.601.501	987.983	1.389.226	702.966	1.079.491	790.555
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	664.274	34.000	116.201	65.636	107.456	65.897	80.848	60.973	86.758	73.546	70.363	247.265	82.403
Belanja	6.366.656	3.736.616	1.445.827	1.071.185	1.683.417	988.743	1.344.060	2.270.070	1.186.224	2.139.849	915.013	1.583.349	1.109.174
Belanja Tidak Langsung	3.221.363	1.365.410	695.026	489.951	988.115	480.342	495.428	642.500	523.993	813.182	427.849	798.149	420.087
Belanja Langsung	3.145.293	2.371.206	750.801	581.234	695.301	508.401	848.632	1.627.570	662.230	1.326.667	487.164	785.200	689.087
Pembiayaan Netto	878.880	1.279.699	194.687	135.519	(18.510)	39.269	359.994	539.000	78.478	602.467	118.291	5.254	222.000
Penerimaan Pembiayaan	953.880	1.604.574	202.812	137.519	4.490	39.269	359.994	550.000	78.614	606.000	118.291	19.736	233.000
Pengeluaran Pembiayaan	75.000	324.874	8.125	2.000	23.000	-	-	11.000	137	3.533	-	14.482	11.000

Lampiran 3

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov. Riau	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kampar	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kota Pekanbaru	Kab. Kepulauan Meranti
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendapatan	6.597.232	3.271.264	1.461.728	1.115.522	1.984.181	1.081.931	1.138.018	2.228.620	1.342.776	1.805.009	1.045.300	1.935.961	1.098.695
PAD	2.401.147	235.121	58.224	38.325	117.485	30.488	55.892	141.174	45.301	193.661	135.376	364.604	30.563
Dana Perimbangan	3.537.458	2.994.143	1.305.789	971.341	1.710.386	948.993	959.793	1.984.111	1.160.135	1.497.994	800.892	1.267.894	945.273
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	658.627	42.000	97.715	105.855	156.310	102.450	122.333	103.335	137.340	113.354	109.032	303.463	122.859
Belanja	8.432.096	4.766.264	1.590.102	1.487.521	2.073.766	1.226.088	1.614.043	2.599.708	1.432.776	2.291.252	1.185.329	1.982.163	1.382.547
Belanja Tidak Langsung	3.556.603	1.712.095	796.980	575.001	1.052.931	512.190	578.153	650.273	584.740	859.983	466.815	887.050	451.048
Belanja Langsung	4.875.493	3.054.169	793.122	912.520	1.020.835	713.898	1.035.890	1.949.436	848.036	1.431.269	718.515	1.095.113	931.499
Pembiayaan Netto	1.834.864	1.495.000	183.670	371.999	89.585	144.157	476.025	73.911	90.000	600.000	246.970	46.202	297.791
Penerimaan Pembiayaan	1.834.864	1.500.000	191.595	371.999	117.560	145.575	476.025	76.411	90.000	600.000	246.970	68.702	312.791
Pengeluaran Pembiayaan		5.000	7.925		27.975	1.419		2.500				22.500	15.000

Lampiran 4

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah) - Permen

Uraian	Kab. Kuantan Singingi
	1
Pendapatan	1.045.150
PAD	25.116
Dana Perimbangan	924.216
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	95.818
Belanja	882.171
Belanja Tidak Langsung	517.590
Belanja Langsung	364.581
Pembiayaan Netto	(19.337)
Penerimaan Pembiayaan	8.732
Pengeluaran Pembiayaan	28.069

Lampiran 5

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Prov. Riau	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kampar	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kab. Kepulauan Meranti	Kota Pekanbaru
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	5.440.440	3.502.942	1.394.239	1.138.297	1.747.962	1.134.243	1.675.911	1.099.910	1.801.437	967.085	921.282	1.536.063
PAD	2.210.131	206.232	55.880	46.851	96.909	46.650	63.252	34.243	198.010	113.392	26.519	223.232
Pendapatan Transfer	3.226.836	3.292.495	1.286.692	1.091.446	1.651.053	1.061.874	1.612.197	1.064.749	1.599.494	698.009	894.094	1.291.820
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.226.836	3.150.077	1.208.042	982.901	1.477.098	974.766	1.495.443	947.862	1.489.288	654.479	832.483	1.053.472
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	95.066	48.739	69.753	124.525	33.874	80.798	80.105	63.147	20.033	39.124	141.906
Transfer Pemerintah Provinsi		47.351	29.910	38.792	49.431	53.235	35.956	36.782	47.059	23.497	22.487	96.442
Lain-lain Pendapatan yang sah	3.473	4.216	51.668	-	-	25.719	462	918	3.932	155.684	669	21.011
Belanja	3.754.114	2.704.278	1.176.257	862.285	1.830.901	972.272	1.626.865	962.116	1.676.722	751.145	792.075	1.443.986
Belanja Operasi	2.411.832	1.928.472	869.571	726.747	1.413.933	702.010	955.516	786.696	1.132.773	646.501	560.379	1.204.811
Belanja Modal	1.342.180	771.835	306.685	133.763	415.815	261.657	671.118	174.203	543.949	104.644	231.439	238.613
Belanja tidak terduga	102	3.971	-	1.775	1.153	8.605	231	1.217	-	-	257	562
Transfer	511.016	-	53.043	-	3.720	39.666	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	4.265.130	2.704.278	1.229.299	862.285	1.834.621	1.011.938	1.626.865	962.116	1.676.722	751.145	792.075	1.443.986
Pembiayaan	164.071	835.462	144.177	54.286	157.380	374.159	522.478	(48.228)	620.225	22.255	122.822	13.151
Penerimaan Pembiayaan	421.520	1.155.080	148.168	104.365	175.935	374.159	527.119	18.853	621.615	26.950	132.822	13.151
Pengeluaran Pembiayaan	257.450	319.618	3.992	50.079	18.555	-	4.642	67.081	1.390	4.695	10.000	-

Lampiran 6

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah) - Permen

Uraian	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Pelalawan
	1	2	3
Pendapatan	1.355.307	1.384.450	1.312.051
PAD	58.011	57.348	55.630
Dana Perimbangan	1.135.442	1.165.563	1.121.456
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	161.854	161.539	134.965
Belanja	1.016.723	1.467.620	1.147.776
Belanja Tidak Langsung	553.074	577.889	469.785
Belanja Langsung	463.649	889.731	677.991
Pembiayaan Netto	(2.922)	563.402	493.220
Penerimaan Pembiayaan	-	567.402	497.340
Pengeluaran Pembiayaan	2.922	4.000	4.120

Lampiran 7

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Prov. Riau	Kab. Bengkalis	Kab. Kampar	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hulu	Kab. Siak	Kota Dumai	Kota Pekanbaru	Kab. Kepulauan Meranti
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan	6.847.316	3.555.922	2.070.273	1.186.776	1.914.090	1.237.540	2.248.768	1.080.451	1.844.883	1.031.148
PAD	2.588.688	205.980	110.077	36.165	66.423	54.370	346.604	115.396	309.534	32.270
Pendapatan Transfer	4.258.627	3.338.579	1.960.197	1.144.585	1.840.199	1.176.286	1.902.164	756.385	1.523.157	989.757
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.618.843	3.190.619	1.758.213	1.039.226	1.738.854	1.070.482	1.768.145	732.137	1.238.475	937.804
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	639.785	76.721	96.857	57.641	47.244	49.416	48.202	-	125.978	24.391
Transfer Pemerintah Provinsi	-	71.239	105.127	47.718	54.101	56.388	85.817	24.248	158.704	27.562
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	11.363	-	6.025	7.468	6.885	-	208.671	12.192	9.121
Belanja	5.695.770	3.055.954	1.794.186	981.186	1.965.598	1.136.423	2.071.317	952.156	1.504.968	886.991
Belanja Operasi	3.734.105	2.229.102	1.489.482	779.881	1.028.533	835.560	1.328.167	768.690	1.219.239	670.745
Belanja Modal	1.961.665	824.637	303.732	201.305	932.093	299.857	743.039	183.466	285.730	216.246
Belanja tidak terduga	-	2.215	972	-	4.973	1.006	111	-	-	-
Transfer	974.995	-	3.750	-	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	6.670.765	3.055.954	1.797.936	981.186	1.965.598	1.136.423	2.071.317	952.156	1.504.968	886.991
Pembiayaan	1.802.403	748.042	44.272	142.561	560.901	89.453	745.685	239.749	80.420	236.030
Penerimaan Pembiayaan	1.907.833	1.628.042	70.722	143.665	570.089	89.757	745.685	239.749	105.227	252.030
Pengeluaran Pembiayaan	105.430	880.000	26.450	1.103	9.188	304	-	-	24.808	16.000

Lampiran 8

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah) - Permen

Uraian	Prov. Riau	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Pelalawan	Kab. Rokan Hilir	Kab. Siak	Kab. Kepulauan Meranti
		1	2	3	4	5	6
Pendapatan	6.994.646	1.384.450	1.231.848	1.338.460	1.955.182	2.273.786	1.050.574
PAD	2.725.624	57.348	46.272	71.444	82.962	348.619	40.193
Dana Perimbangan	3.610.182	1.165.563	1.029.989	1.112.369	1.760.245	1.768.817	914.869
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	658.840	161.539	155.586	154.647	111.974	156.351	95.512
Belanja	7.525.283	1.467.620	1.257.566	1.345.055	2.281.576	2.263.619	1.002.663
Belanja Tidak Langsung	3.292.873	577.889	524.736	563.608	605.633	839.885	400.700
Belanja Langsung	4.232.410	889.731	732.831	781.447	1.675.943	1.423.734	601.963
Pembiayaan Netto	1.978.313	563.402	348.191	658.833	509.392	923.458	370.187
Penerimaan Pembiayaan	1.978.313	567.402	348.191	658.833	509.392	923.458	380.187
Pengeluaran Pembiayaan	-	4.000	-	-	-	-	10.000

Lampiran 9

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Kab. Bengkalis	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Kampar	Kab. Rokan Hulu	Kota Dumai	Kota Pekanbaru
	1	2	3	4	5	6
Pendapatan	3.108.937	1.545.474	2.268.351	1.311.421	1.088.395	1.995.608
PAD	181.667	80.512	157.869	57.064	157.466	370.922
Pendapatan Transfer	2.905.444	1.464.961	2.110.482	1.254.357	930.929	1.614.588
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.768.805	1.323.840	1.859.204	1.082.035	810.499	1.285.984
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	89.445	82.203	132.655	62.269	49.112	160.439
Transfer Pemerintah Provinsi	47.195	58.918	118.624	110.052	71.318	168.165
Lain-lain Pendapatan yang sah	21.825	-	-	-	-	10.098
Belanja	3.686.421	1.524.027	2.114.899	1.422.404	1.212.894	1.938.889
Belanja Operasi	2.414.713	1.160.864	1.660.105	1.007.617	869.188	1.467.383
Belanja Modal	1.271.709	363.162	452.779	412.038	343.407	470.984
Belanja tidak terduga	-	-	2.014	2.748	299	522
Transfer	-	-	3.750	-	-	-
Belanja dan Transfer	3.686.421	1.524.027	2.118.649	1.422.404	1.212.894	1.938.889
Pembiayaan	1.248.010	418.801	288.634	190.678	368.044	402.225
Penerimaan Pembiayaan	1.248.010	425.443	316.609	190.678	368.044	422.225
Pengeluaran Pembiayaan	-	6.642	27.975	-	-	20.000

Lampiran 10

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah)

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pembiayaan Netto	Penerimaan	Pengeluaran
Prov. Sumatera Utara		3.181.900	1.271.127	27.756	4.480.782	2.031.752	2.646.109	4.677.861	197.080	387.997	190.918
1	Kab. Asahan	26.612	617.127	146.403	790.142	505.941	297.285	803.227	13.085	28.235	15.150
2	Kab. Dairi	14.504	439.049	15.267	468.820	337.952	153.646	491.598	22.778	29.615	6.837
3	Kab. Deli Serdang	300.134	1.043.402	314.330	1.657.866	959.400	707.332	1.666.732	8.866	15.000	6.134
4	Kab. Tanah Karo	31.150	506.722	98.651	636.522	476.218	246.120	722.338	85.816	87.056	1.241
5	Kab. Labuhan Batu	48.921	468.736	109.512	627.169	352.717	283.550	636.267	9.098	12.188	3.090
6	Kab. Langkat	38.637	910.028	132.771	1.081.435	725.384	426.533	1.151.917	70.482	75.482	5.000
7	Kab. Mandailing Natal	25.000	537.480	63.224	625.704	405.663	220.041	625.704	-	3.300	3.300
8	Kab. Nias	10.092	315.030	6.369	331.491	155.188	234.857	390.045	72.689	72.689	-
9	Kab. Simalungun	58.441	845.394	102.675	1.006.510	786.809	264.399	1.051.209	44.699	56.300	11.601
10	Kab. Tapanuli Selatan	38.126	446.182	115.076	599.384	360.948	215.597	576.545	(22.839)	30.000	52.839
11	Kab. Tapanuli Tengah	16.709	418.884	109.218	544.812	340.112	222.069	562.181	17.369	26.507	9.137

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pembiayaan Netto	Penerimaan	Pengeluaran
12	Kab. Tapanuli Utara	13.528	492.928	117.776	624.233	359.574	292.439	652.013	27.780	29.000	1.220
13	Kab. Toba Samosir	12.032	387.960	28.421	428.412	300.963	117.140	418.103	(10.310)	325	10.635
14	Kota Binjai	33.043	399.464	52.539	485.046	298.989	195.823	494.812	9.765	13.605	3.840
15	Kota Medan	829.794	1.315.146	483.161	2.628.101	1.457.820	1.473.572	2.931.392	303.291	338.906	35.616
16	Kota Pematang Siantar	43.648	428.443	108.951	581.042	383.494	223.044	606.538	25.496	28.014	2.518
17	Kota Sibolga	17.840	310.018	60.274	388.133	188.514	217.382	405.896	17.764	24.447	6.683
18	Kota Tanjung Balai	22.146	315.721	36.889	374.756	220.669	165.301	385.970	11.214	19.352	8.137
19	Kota Tebing Tinggi	27.991	303.027	24.808	355.826	229.783	184.781	414.564	58.738	63.638	4.900
20	Kota Padang Sidempuan	19.755	360.663	37.101	417.518	266.383	159.431	425.814	8.296	14.624	6.328
21	Kab. Pakpak Bharat	5.045	248.126	15.718	268.888	141.081	148.951	290.032	21.143	22.993	1.850
22	Kab. Nias Selatan	10.000	390.352	56.561	456.912	238.523	285.196	523.719	66.807	94.807	28.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	18.244	370.268	60.907	449.419	258.766	194.597	453.363	7.591	19.971	12.379
24	Kab. Serdang Bedagai	35.710	575.264	140.962	751.936	444.574	268.956	713.531	(38.406)	-	38.406
25	Kab. Samosir	20.569	334.430	39.229	394.227	218.010	203.576	421.586	27.358	88.358	61.000
26	Kab. Batu Bara	16.316	453.865	70.482	540.664	240.940	318.723	559.664	19.000	20.000	1.000

No	Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pembiayaan Netto	Penerimaan	Pengeluaran
28	Kab. Padang Lawas Utara	15.083	331.103	51.266	397.452	192.455	216.027	408.481	21.958	26.324	4.366
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	10.053	356.359	46.634	413.046	213.043	264.301	477.343	64.297	64.297	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	7.809	416.595	56.429	480.832	249.157	245.666	494.823	13.991	13.991	-
31	Kab. Nias Utara	2.000	293.973	30.246	326.219	104.882	251.338	356.219	30.001	36.877	6.876
32	Kab. Nias Barat	2.000	265.847	29.747	297.594	78.561	233.868	312.429	15.943	15.943	-
33	Kota Gunung Sitoli	4.000	312.572	6.465	323.037	155.175	188.156	343.331	20.294	20.294	-

Lampiran 11

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Dairi	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Karo	Kab. Labuhan Batu	Kab. Langkat	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Tengah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	7.332.537	817.686	576.470	2.039.441	764.588	675.496	1.311.437	680.303	375.382	1.389.064	712.208	634.083
PAD	4.026.427	31.887	20.508	380.055	46.826	50.000	59.280	45.000	24.008	113.095	56.283	26.000
Dana Perimbangan	1.686.144	741.549	518.733	1.253.737	619.526	589.496	1.056.151	616.933	346.873	1.022.423	541.540	494.802
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.619.965	44.250	37.229	405.649	98.236	36.000	196.006	18.370	4.500	253.546	114.386	113.281
Belanja	7.677.852	837.686	600.877	2.036.654	824.500	710.270	1.382.151	672.801	431.735	1.398.050	714.786	630.111
Belanja Tidak Langsung	5.022.929	514.389	394.602	1.019.126	518.672	398.263	853.304	447.505	152.272	895.859	399.152	387.249
Belanja Langsung	2.654.924	323.297	206.275	1.017.528	305.828	312.008	528.847	225.297	279.463	502.192	315.634	242.862
Pembiayaan Netto	345.315	20.000	48.571	(2.787)	59.911	34.775	135.219	(7.501)	65.749	8.986	2.578	(3.972)
Penerimaan Pembiayaan	700.028	25.000	48.571	7.500	59.911	35.864	142.923	2.499	66.749	44.834	18.192	7.905
Pengeluaran Pembiayaan	354.712	5.000	-	10.287	-	1.090	7.704	10.000	1.000	35.847	15.615	11.877

Uraian	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Toba Samosi r	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Nias Selatan	Kab. Humbang Hasundutan
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pendapatan	674.057	576.041	625.775	3.656.534	649.554	377.653	461.942	318.215	496.114	302.675	511.871	506.336
PAD	14.303	18.913	35.179	1.416.229	60.032	21.100	31.855	28.939	23.159	6.271	15.008	10.745
Dana Perimbangan	563.530	464.588	479.505	1.343.457	478.400	333.143	348.138	281.007	416.527	279.853	466.296	430.806
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.224	92.540	111.091	896.848	111.123	23.410	81.949	8.269	56.429	16.551	30.568	64.784
Belanja	703.080	576.915	652.252	3.825.134	657.341	398.940	484.903	347.611	493.747	328.123	612.508	529.132
Belanja Tidak Langsung	387.939	363.402	374.565	1.736.745	427.474	216.100	249.514	224.416	335.173	155.187	246.557	297.136
Belanja Langsung	315.141	213.512	277.687	2.088.389	229.867	182.841	235.390	123.195	158.574	172.936	365.951	231.997
Pembiayaan Netto	29.023	873	26.478	168.599	7.787	21.287	22.961	29.396	(2.368)	25.448	100.636	22.797
Penerimaan Pembiayaan	29.643	3.048	37.884	229.346	18.787	27.189	32.719	32.096	3.526	27.298	111.136	45.248
Pengeluaran Pembiayaan	620	2.174	11.406	60.747	11.000	5.902	9.758	2.700	5.893	1.850	10.500	22.451

Uraian	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Samosir	Kab. Batu Bara	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Nias Utara	Kab. Nias Barat	Kota Gunung Sitoli
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Pendapatan	859.282	430.382	635.717	524.125	564.319	468.835	522.537	320.688	319.473	397.268
PAD	40.969	14.063	17.590	28.177	14.677	18.726	13.065	5.000	6.000	(211.815)
Dana Perimbangan	672.825	383.827	534.616	415.431	420.798	415.330	472.831	311.688	300.562	259.633
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	145.487	32.492	83.511	80.517	128.844	34.780	36.642	4.000	12.911	(37.852)
Belanja	841.424	440.324	649.717	532.451	586.867	489.219	537.064	327.059	343.115	9.466
Belanja Tidak Langsung	464.394	241.769	308.760	246.853	241.021	227.174	284.060	110.310	94.862	(102.010)
Belanja Langsung	377.031	198.555	340.956	285.597	345.845	262.045	253.004	216.749	248.253	111.476
Pembiayaan Netto	(17.857)	9.943	14.000	(1.376)	22.548	20.384	14.527	6.370	23.642	(4.442)
Penerimaan Pembiayaan	11.753	71.000	20.000	13.093	22.548	21.414	14.527	11.043	23.642	(12.278)
Pengeluaran Pembiayaan	29.610	61.057	6.000	14.469	-	1.030	-	4.673	-	(7.835)

Lampiran 12

Data APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Dairi	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Karo	Kab. Labuhan Batu	Kab. Langkat	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Tengah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pendapatan	8.481.872	1.057.746	731.556	2.390.481	854.453	759.607	1.592.146	780.590	429.330	1.434.414	830.544	897.170
PAD	4.809.369	54.038	37.323	465.000	48.166	66.557	68.972	47.000	30.533	63.738	64.087	26.660
Dana Perimbangan	2.007.091	867.121	598.764	1.422.095	708.747	625.051	1.226.452	716.503	394.298	1.120.933	611.080	599.217
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.665.412	136.587	95.469	503.387	97.539	68.000	296.722	17.087	4.500	249.742	155.378	271.293
Belanja	8.866.922	1.038.246	763.256	2.383.194	854.453	797.936	1.686.770	782.790	507.809	1.397.127	911.995	894.270
Belanja Tidak Langsung	6.187.304	686.133	477.671	1.121.494	524.578	411.188	1.079.457	467.334	171.917	1.049.314	458.526	415.977
Belanja Langsung	2.679.618	352.113	285.585	1.261.700	329.874	386.748	607.313	315.455	335.892	347.814	453.469	478.293
Pembiayaan Netto	385.051	(19.500)	31.700	(7.287)		38.328	94.625	2.200	87.335	(37.287)	81.451	(2.900)
Penerimaan Pembiayaan	385.051		41.000	2.500		40.118	97.625	11.000	87.335	500	92.406	5.600
Pengeluaran Pembiayaan		19.500	9.300	9.787		1.790	3.000	8.800		37.787	10.955	8.500

Uraian	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Toba Samosir	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Nias Selatan	Kab. Humbang Hasundutan
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pendapatan	809.011	760.286	751.196	4.330.231	777.127	502.695	560.583	468.613	666.281	384.612	782.595	646.570
PAD	36.138	19.007	46.140	1.758.788	71.612	30.587	32.035	36.273	42.180	9.335	75.541	15.213
Dana Perimbangan	634.042	491.153	538.685	1.544.972	548.853	385.447	415.097	421.840	489.416	350.799	561.338	517.228
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	138.830	250.126	166.371	1.026.471	156.662	86.661	113.451	10.500	134.685	24.478	145.716	114.130
Belanja	826.403	775.751	814.462	4.524.738	789.237	500.467	584.623	497.471	683.657	404.258	818.720	659.374
Belanja Tidak Langsung	488.270	438.195	427.843	1.878.853	470.423	235.085	261.429	252.426	380.019	172.220	276.506	338.710
Belanja Langsung	338.133	337.556	386.618	2.645.885	318.814	265.382	323.195	245.045	303.638	232.038	542.215	320.664
Pembiayaan Netto	17.393	15.465	63.266	194.506	12.110	17.772	24.040	29.672	17.837	19.646	36.125	12.804
Penerimaan Pembiayaan	19.493	43.638	67.579	238.660	23.610	23.045	38.570	33.672	24.094	22.306	53.125	15.554
Pengeluaran Pembiayaan	2.100	28.173	4.313	44.154	11.500	5.273	14.530	4.000	6.257	2.660	17.000	2.750

Uraian	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Samosir	Kab. Batu Bara	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Nias Utara	Kab. Nias Barat	Kota Gunung Sitoli
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Pendapatan	1.052.662	514.563	833.815	555.917	686.429	738.881	630.997	400.658	343.802	436.123
PAD	53.785	20.008	35.362	25.905	15.498	130.288	23.207	12.500	8.200	20.478
Dana Perimbangan	745.490	446.374	586.798	441.403	460.535	509.289	540.994	362.277	321.772	401.629
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	253.387	48.182	211.655	88.609	210.397	99.304	66.796	25.881	13.830	14.017
Belanja	1.050.662	570.837	838.315	585.018	713.941	766.535	630.997	456.528	368.658	454.848
Belanja Tidak Langsung	474.376	262.376	414.629	276.864	295.039	269.562	322.504	152.067	116.586	206.357
Belanja Langsung	576.286	308.461	423.687	308.154	418.902	496.972	308.494	304.461	252.072	248.491
Pembiayaan Netto	(2.000)	56.745	5.000	29.101	27.421	27.654		46.762	24.856	18.725
Penerimaan Pembiayaan		87.216	5.000	52.899	28.318	29.154		49.752	24.856	18.725
Pengeluaran Pembiayaan	2.000	30.471		23.798	897	1.500		2.990		

Lampiran 13

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah) - Permen

Uraian	Kota Medan	Kota Tebing Tinggi	Kab. Nias Barat
	1	2	3
Pendapatan	2.747.359	411.270	282.668
PAD	995.073	32.739	2.864
Dana Perimbangan	1.422.442	304.033	251.084
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	329.845	74.498	28.720
Belanja	3.041.038	439.095	257.180
Belanja Tidak Langsung	1.488.661	232.014	78.351
Belanja Langsung	1.552.377	207.081	178.828
Pembiayaan Netto	374.351	83.271	15.634
Penerimaan Pembiayaan	389.468	87.171	15.727
Pengeluaran Pembiayaan	15.117	3.900	93

Lampiran 14

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Dairi	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Karo	Kab. Labuhan Batu	Kab. Langkat	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Tengah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	4.958.482	843.678	549.635	1.624.363	650.260	670.125	1.108.553	682.879	409.361	1.078.593	652.667	555.239
PAD	3.578.462	31.844	17.673	213.792	35.363	50.959	34.541	27.526	18.944	42.543	57.464	18.210
Pendapatan Transfer	1.373.898	794.605	522.918	1.384.246	607.053	614.085	1.055.735	655.353	387.548	1.019.491	588.217	516.944
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.373.898	629.142	443.722	1.064.006	515.454	460.032	928.573	539.496	336.708	828.603	450.931	421.698
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	123.884	67.886	215.293	72.812	116.842	96.309	84.131	42.335	154.135	91.625	81.062
Transfer Pemerintah Provinsi	-	41.579	11.310	104.947	18.787	37.211	30.853	31.725	8.505	36.753	45.661	14.183
Lain-lain Pendapatan yang sah	6.122	17.228	9.044	26.326	7.844	5.082	18.277	-	2.869	16.558	6.986	20.086
Belanja	3.810.443	889.574	535.858	1.630.139	675.614	628.347	1.063.869	650.263	406.403	1.088.623	554.349	544.322
Belanja Operasi	2.747.051	708.324	459.685	1.314.771	547.166	512.849	944.619	560.545	262.143	953.500	416.360	444.364
Belanja Modal	1.063.237	179.238	74.602	314.746	128.448	115.454	119.040	88.218	144.051	132.102	137.836	99.683
Belanja tidak terduga	155	2.012	1.570	622	-	44	211	1.500	208	3.020	153	275
Transfer	801.035	3.000	-	24.735	-	4.000	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	4.611.477	892.574	535.858	1.654.874	675.614	632.347	1.063.869	650.263	406.403	1.088.623	554.349	544.322
Pembiayaan	373.967	71.473	32.160	37.068	85.266	(462)	6.861	(2.154)	108.991	23.403	(24.240)	5.270
Penerimaan Pembiayaan	404.885	86.623	40.996	41.797	87.056	2.773	8.861	333	116.991	43.565	23.936	11.580
Pengeluaran Pembiayaan	30.918	15.150	8.836	4.729	1.791	3.235	2.000	2.487	8.000	20.163	48.176	6.310

Uraian	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Toba Samosir	Kota Binjai	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Padang Sidempuan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Nias Selatan	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Samosir
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pendapatan	676.187	486.293	579.566	565.384	385.948	390.222	477.061	323.213	491.454	464.391	779.632	415.920
PAD	36.063	14.118	26.470	44.793	21.663	27.089	21.465	6.306	23.031	12.870	35.894	14.202
Pendapatan Transfer	633.409	452.910	509.467	504.938	363.224	322.406	444.199	312.210	464.281	434.163	717.589	340.923
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	488.403	380.231	401.835	403.598	290.946	312.341	357.577	250.595	399.717	374.194	572.521	334.265
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	130.216	62.425	91.735	80.128	66.888	-	77.972	59.354	59.964	51.614	124.535	-
Transfer Pemerintah Provinsi	14.791	10.254	15.898	21.211	5.390	10.065	8.650	2.260	4.600	8.355	20.533	6.658
Lain-lain Pendapatan yang sah	6.715	19.265	43.629	15.653	1.061	40.727	11.397	4.697	4.142	17.358	26.148	60.796
Belanja	705.123	479.662	546.497	564.820	368.638	393.779	463.525	318.569	479.422	432.517	731.773	419.709
Belanja Operasi	514.329	374.911	414.557	485.682	278.674	301.477	387.748	205.081	377.903	352.928	607.642	299.823
Belanja Modal	188.144	104.553	131.940	73.017	89.964	92.006	75.776	113.488	96.215	78.729	124.132	119.696
Belanja tidak terduga	2.650	199	-	6.120	-	296	-	-	5.304	861	-	190
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.434
Belanja dan Transfer	705.123	479.662	546.497	564.820	368.638	393.779	463.525	318.569	479.422	432.517	731.773	431.143
Pembiayaan	65.767	(4.213)	23.303	17.246	19.870	35.859	15.291	22.661	96.004	32.850	(35.921)	46.554
Penerimaan Pembiayaan	69.927	(151)	26.912	22.696	26.230	43.537	25.153	23.353	98.004	42.997	278	87.392
Pengeluaran Pembiayaan	4.160	4.062	3.609	5.450	6.360	7.678	9.862	692	2.000	10.146	36.198	40.837

Uraian	Kab. Batu Bara	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Nias Utara	Kota Gunung Sitoli
	24	25	26	27	28	29	30
Pendapatan	564.120	395.175	428.562	434.072	540.873	330.653	369.655
PAD	13.241	7.628	8.728	17.081	10.518	6.655	6.051
Pendapatan Transfer	532.162	368.878	387.580	404.394	525.657	319.281	359.397
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	442.376	316.710	337.797	350.529	416.851	282.795	313.141
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	76.108	39.328	37.089	40.091	92.829	31.312	26.083
Transfer Pemerintah Provinsi	13.678	12.840	12.694	13.774	15.978	5.174	20.174
Lain-lain Pendapatan yang sah	18.717	18.669	32.254	12.597	4.697	4.718	4.207
Belanja	558.737	416.235	453.840	429.131	528.500	280.931	343.828
Belanja Operasi	419.804	285.862	291.875	280.619	386.639	186.427	206.983
Belanja Modal	138.480	130.126	161.465	146.177	141.022	94.493	136.449
Belanja tidak terduga	453	247	499	2.336	838	12	396
Transfer	-	-	-	4.000	10.634	-	4.089
Belanja dan Transfer	558.737	416.235	453.840	433.131	539.133	280.931	347.918
Pembiayaan	6.477	34.431	40.581	119.732	35.719	30.163	25.641
Penerimaan Pembiayaan	6.477	41.445	42.001	121.065	35.719	36.877	25.641
Pengeluaran Pembiayaan	-	7.014	1.420	1.333	-	6.714	-

Lampiran 15**Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah) - Permen**

Uraian	Kab. Toba Samosir	Kota Medan	Kab. Nias Utara
	1	2	3
Pendapatan	656.082	2.997.427	350.468
PAD	16.543	1.147.124	5.671
Dana Perimbangan	463.268	1.417.186	318.496
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	176.271	433.117	26.301
Belanja	619.897	3.021.172	343.102
Belanja Tidak Langsung	350.988	1.526.322	116.529
Belanja Langsung	268.909	1.494.851	226.573
Pembiayaan Netto	1.943	45.477	6.537
Penerimaan Pembiayaan	2.417	80.672	11.043
Pengeluaran Pembiayaan	474	35.195	4.507

Lampiran 16

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Dairi	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Karo	Kab. Labuhan Batu	Kab. Langkat	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Tengah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	7.200.498	1.039.734	612.557	1.853.853	753.389	764.413	1.378.567	791.409	419.400	1.394.641	726.287	705.933
PAD	4.050.764	37.895	20.912	291.018	41.243	59.439	129.243	21.274	29.822	61.246	56.418	21.137
Pendapatan Transfer	3.124.155	999.563	578.751	1.501.515	685.733	667.503	1.199.682	770.135	369.988	1.163.954	668.753	575.462
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.605.182	751.913	521.886	1.237.551	615.142	591.321	1.060.399	624.737	351.220	1.021.460	547.420	507.033
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.518.974	81.337	49.317	170.965	60.038	48.455	116.778	78.437	15.837	122.852	40.551	51.768
Transfer Pemerintah Provinsi	-	166.313	7.548	92.998	10.552	27.727	22.505	66.961	2.931	19.642	80.783	16.661
Lain-lain Pendapatan yang sah	25.579	2.277	12.894	61.321	26.413	37.471	49.643	-	19.590	169.440	1.116	109.334
Belanja	7.082.764	1.037.634	593.188	1.801.287	750.398	756.082	1.329.229	765.110	404.093	1.378.043	676.128	680.016
Belanja Operasi	6.276.581	778.329	492.052	1.465.594	597.203	551.406	1.074.125	628.270	250.817	1.060.260	481.934	525.694
Belanja Modal	803.608	259.227	97.984	334.254	153.196	204.123	255.053	133.047	153.105	314.892	194.194	154.200
Belanja tidak terduga	2.575	77	3.152	1.439	-	553	51	3.793	172	2.891	-	123
Transfer	549.532	-	-	24.784	-	4.500	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	7.632.295	1.037.634	593.188	1.826.070	750.398	760.582	1.329.229	765.110	404.093	1.378.043	676.128	680.016
Pembiayaan	446.525	17.282	22.236	(22.076)	59.911	36.236	43.776	20.630	106.949	(15.106)	42.895	9.958
Penerimaan Pembiayaan	711.837	22.282	45.937	6.947	59.911	37.316	51.480	30.630	106.949	13.373	56.978	16.196
Pengeluaran Pembiayaan	265.312	5.000	23.702	29.023	-	1.080	7.704	10.000	-	28.478	14.083	6.238

Uraian	Kab. Tapanuli Utara	Kota Binjai	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Nias Selatan	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Serdang Bedagai
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pendapatan	725.670	689.107	669.207	411.288	465.869	482.098	540.468	311.051	538.097	551.372	875.700
PAD	34.023	48.178	49.915	26.698	27.702	47.331	23.622	6.353	15.592	17.902	39.275
Pendapatan Transfer	643.768	552.755	570.319	356.552	357.295	398.118	476.082	294.450	522.504	492.161	760.447
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	567.953	482.078	494.526	333.435	350.520	357.857	421.732	282.389	471.771	439.194	671.124
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	65.514	60.092	62.146	19.347	-	34.208	48.972	10.071	16.148	46.952	75.514
Transfer Pemerintah Provinsi	10.300	10.586	13.647	3.770	6.775	6.053	5.377	1.990	34.586	6.016	13.809
Lain-lain Pendapatan yang sah	47.880	88.174	48.973	28.037	80.872	36.648	40.764	10.248	-	41.308	75.979
Belanja	737.700	650.087	639.607	414.041	446.141	479.585	527.246	296.703	621.171	511.538	830.318
Belanja Operasi	563.794	491.878	545.320	323.141	331.957	381.063	428.487	226.465	418.371	386.293	679.914
Belanja Modal	171.508	158.209	90.832	90.900	114.085	97.955	98.759	70.238	202.754	124.493	148.713
Belanja tidak terduga	2.397	-	3.455	-	98	566	-	-	47	752	1.691
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.241
Belanja dan Transfer	737.700	650.087	639.607	414.041	446.141	479.585	527.246	296.703	621.171	511.538	833.559
Pembiayaan	36.831	1.712	15.810	33.287	29.443	53.836	20.431	27.305	91.167	44.181	(19.421)
Penerimaan Pembiayaan	36.831	5.593	17.810	37.180	33.298	55.536	28.828	27.305	107.367	64.724	11.938
Pengeluaran Pembiayaan	-	3.881	2.000	3.893	3.856	1.700	8.397	-	16.200	20.543	31.359

Uraian	Kab. Samosir	Kab. Batu Bara	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Nias Barat	Kota Gunung Sitoli
	23	24	25	26	27	28	29	30
Pendapatan	447.732	653.172	484.827	580.809	506.154	671.575	323.241	437.534
PAD	17.460	16.558	9.881	12.798	18.977	18.971	5.461	9.330
Pendapatan Transfer	385.660	580.901	438.138	446.475	446.355	527.678	307.668	427.334
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	380.799	524.477	410.794	415.651	413.225	481.110	305.295	378.060
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	48.119	20.575	22.560	24.459	37.337	-	31.974
Transfer Pemerintah Provinsi	4.860	8.305	6.769	8.263	8.671	9.231	2.373	17.300
Lain-lain Pendapatan yang sah	44.613	55.713	36.807	121.536	40.822	124.926	10.112	871
Belanja	400.831	641.952	439.834	571.472	438.876	665.840	275.441	401.324
Belanja Operasi	314.659	472.908	322.836	338.554	292.126	415.269	168.163	250.981
Belanja Modal	85.424	168.742	116.854	232.918	145.201	250.093	106.214	149.729
Belanja tidak terduga	748	301	144	-	1.550	477	1.065	615
Transfer	14.182	-	-	-	3.844	12.274	-	5.344
Belanja dan Transfer	415.012	641.952	439.834	571.472	442.720	678.114	275.441	406.669
Pembiayaan	30.708	(1.741)	986	14.861	119.893	37.333	41.125	47.375
Penerimaan Pembiayaan	62.388	(1.741)	12.581	15.306	120.874	37.333	41.125	47.375
Pengeluaran Pembiayaan	31.680	-	11.594	445	980	-	-	-

Lampiran 17

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah) - Permen

Uraian	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Labuhanbatu Utara
	1	2	3
Pendapatan	1.704.472	627.806	755.137
PAD	75.909	17.633	25.651
Dana Perimbangan	1.275.095	519.014	541.453
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.468	91.159	188.033
Belanja	1.668.769	605.790	766.421
Belanja Tidak Langsung	942.963	319.105	317.884
Belanja Langsung	725.807	286.685	448.537
Pembiayaan Netto	(5.948)	(929)	31.088
Penerimaan Pembiayaan	-	-	31.088
Pengeluaran Pembiayaan	5.948	929	-

Lampiran 18

Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (dalam jutaan rupiah) - SAP

Uraian	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan	Kab. Dairi	Kab. Deli Serdang	Kab. Tanah Karo	Kab. Labuhan Batu	Kab. Langkat	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	7.405.958	1.202.013	719.213	2.096.336	909.311	827.443	1.555.902	870.952	461.359	1.468.168	810.115
PAD	4.092.722	53.692	29.933	328.348	46.343	49.785	65.521	47.666	44.726	97.915	69.220
Pendapatan Transfer	3.251.772	1.133.833	678.335	1.756.113	795.997	716.233	1.419.706	823.286	416.633	1.321.711	740.895
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.710.525	878.628	600.146	1.401.726	704.069	621.030	1.233.279	702.429	415.008	1.119.108	611.458
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.541.247	106.929	70.945	265.347	83.420	68.634	172.223	96.618	-	188.013	52.334
Transfer Pemerintah Provinsi	-	148.276	7.243	89.040	8.509	26.569	14.204	24.239	1.625	14.589	77.103
Lain-lain Pendapatan yang sah	61.464	14.488	10.945	11.875	66.971	61.425	70.674	-	-	48.543	-
Belanja	6.746.400	1.143.614	694.247	2.005.506	901.676	825.647	1.536.812	850.556	476.488	1.432.131	842.846
Belanja Operasi	5.985.179	871.761	550.584	1.652.298	656.245	598.418	1.228.208	706.754	303.058	1.193.848	575.238
Belanja Modal	760.722	271.753	138.860	352.334	245.359	226.694	308.212	141.626	173.429	234.348	267.454
Belanja tidak terduga	498	100	4.803	875	72	535	392	2.176	-	3.935	154
Transfer	522.121	-	-	29.116	-	1.500	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	7.268.521	1.143.614	694.247	2.034.622	901.676	827.147	1.536.812	850.556	476.488	1.432.131	842.846
Pembiayaan	(86.092)	5.195	33.336	(8.973)	63.845	38.277	89.702	38.283	11.622.600	(12.558)	82.938
Penerimaan Pembiayaan	14.108	22.695	41.605	(4.772)	63.845	40.067	92.702	47.083	11.625.565	1.492	92.422
Pengeluaran Pembiayaan	100.200	17.500	8.269	4.201	-	1.790	3.000	8.800	2.965	14.051	9.484

Uraian	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Toba Samosir	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Pematang Siantar	Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Tebing Tinggi	Kota Padang Sidempuan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Serdang Bedagai
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pendapatan	871.724	717.187	711.568	3.267.015	731.041	462.587	542.933	596.250	625.779	390.450	988.059
PAD	23.211	19.803	49.173	1.206.170	61.358	29.458	31.921	53.200	35.018	9.081	50.372
Pendapatan Transfer	695.776	570.645	612.353	2.060.846	653.588	422.924	453.245	482.280	562.902	365.030	864.335
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	603.804	499.263	530.809	1.506.316	559.741	388.296	418.300	427.473	489.006	350.859	742.398
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.953	65.205	74.039	363.759	81.711	31.052	29.544	49.036	68.807	12.250	114.075
Transfer Pemerintah Provinsi	30.019	6.177	7.505	190.771	12.137	3.576	5.401	5.771	5.089	1.922	7.861
Lain-lain Pendapatan yang sah	152.737	126.739	50.042	-	16.095	10.205	57.767	60.770	27.858	16.339	73.353
Belanja	861.258	770.736	702.168	3.224.449	741.073	450.894	472.460	584.572	614.899	381.852	979.792
Belanja Operasi	601.571	642.694	568.965	2.593.085	603.602	363.834	362.933	423.712	497.683	233.865	728.360
Belanja Modal	258.593	125.577	133.103	630.803	134.010	87.060	108.800	160.860	117.217	147.987	250.622
Belanja tidak terduga	1.093	2.465	100	561	3.461	-	726	-	-	-	810
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.170
Belanja dan Transfer	861.258	770.736	702.168	3.224.449	741.073	450.894	472.460	584.572	614.899	381.852	982.962
Pembiayaan	24.879	32.649	87.474	21.138	38.871	26.326	36.179	52.351	27.372	40.975	12.049
Penerimaan Pembiayaan	35.928	38.128	91.132	33.839	45.763	30.619	50.293	56.351	33.653	41.575	22.720
Pengeluaran Pembiayaan	11.049	5.479	3.658	12.701	6.892	4.292	14.114	4.000	6.281	600	10.672

Uraian	Kab. Samosir	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Nias Utara	Kab. Nias Barat
	23	24	25	26	27	28
Pendapatan	529.781	539.014	276.976	618.909	410.461	326.277
PAD	26.661	23.140	5.805	26.702	8.857	7.224
Pendapatan Transfer	445.738	475.380	271.171	592.207	383.237	319.053
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	441.138	442.927	251.604	510.631	363.089	303.732
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	26.044	15.811	33.869	16.842	11.556
Transfer Pemerintah Provinsi	4.600	6.409	3.756	47.707	3.306	3.765
Lain-lain Pendapatan yang sah	57.381	40.495	-	-	18.366	-
Belanja	506.372	504.166	166.895	720.350	442.082	358.734
Belanja Operasi	343.873	366.543	132.652	385.283	257.712	197.295
Belanja Modal	162.440	137.298	34.243	335.067	184.356	161.068
Belanja tidak terduga	59	326	-	-	14	372
Transfer	15.856	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	522.228	504.166	166.895	720.350	442.082	358.734
Pembiayaan	61.977	36.026	-	183.461	74.457	88.739
Penerimaan Pembiayaan	93.429	46.039	-	183.461	85.883	88.739
Pengeluaran Pembiayaan	31.451	10.013	-	-	11.426	-